

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 dapat kami selesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2022 merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan LKjIP berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative. Oleh karena itu penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad Pemerintah Kabupaten Pati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja (Renja). Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati kami buat dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan Sekretariat Daerah di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas publik sehingga akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pati, Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PATI



Drs. JUMANI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701114 199011 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Aparatur	2
D. Aspek Strategis	4
D.1. Perencanaan Strategis	4
D.2. Tujuan	5
D.3. Sasaran	6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	17
B. Analisis Capaian Kinerja	20
C. Akuntabilitas Keuangan	45
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Sekeretaris Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022	
2. Laporan Evaluasi Renja TW.IV Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.2. Pemetaan Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Sasaran Strategis	10
Tabel 2.3. Indikator Kinerja dan Target Sesuai Sasaran Strategis Tahun 2022	13
Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022.....	14
Tabel 3.1. IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2022...	18
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022	19
Tabel 3.3. Pembanding Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	21
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	25
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kegiatan Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	26
Tabel 3.6. Pembanding Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	31
Tabel 3.7. Daftar Raperda Tahun 2022	32
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	34
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	35
Tabel 3.10. Pembanding Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan	

Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	37
Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....	39
Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	40
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Bagian	43
Tabel 3.14. Capaian Kinerja yang Belum Mencapai Target	44
Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	46
Tabel 3.16. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	50
Tabel 3.17. Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Masing-masing Bagian Tahun Anggaran 2022	51

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	3
Grafik 1.2. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	4
Grafik 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022	20
Grafik 3.2. Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022	21
Grafik 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati	26
Grafik 3.4. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati	29
Grafik 3.5. Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022	31
Grafik 3.6. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	35
Grafik 3.7. Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022	38
Grafik 3.8. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan Dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	41
Grafik 3.9. Capaian Kinerja Bagian	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diuji. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2017 - 2022 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017-2022. Pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2017-2022

Untuk mencapai visi dan misi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Sekretariat Daerah tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis dapat tercapai dengan kategori melampaui target yaitu sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 3. Namun, ada 1 sasaran strategis yang tidak mencapai target yaitu sasaran strategis 2. Hal ini disebabkan ada dari 4 (empat) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dari target keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) Raperda pada tahun 2022 oleh karena terdapat substansi/ materi Raperda yang belum dicapai kesepakatan dalam tahap pembahasan. Keberhasilan capaian Sasaran strategis Sekretariat Daerah merupakan hasil dari upaya – upaya Sekretariat Daerah, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Pati dari 3 (tiga) Sasaran

Strategis yang telah ditetapkan adalah sebesar **100,59%**. Berikut capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2022 per Sasaran Strategis :



Untuk pembiayaan program/kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Pati Tahun 2022 terealisasi 87,57%. atau efisiensi sebesar 12,43% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 16.178.817.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.168.024.141,- Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, maka kedepan akan dilakukan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua bagian yang dilandasi dengan perencanaan yang terukur dan komitmen pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, perlu melakukan re-orientasi terhadap formulasi indikator kinerja program dan kegiatan supaya bisa terukur dengan tepat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/ atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
6. Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Setda Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu **“Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”**

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung dengan susunan kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawati PNS sebanyak orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan

Golongan IV sebanyak 20 orang, terdiri dari :

- ❖ IV/a : 6 orang
- ❖ IV/b : 11 orang
- ❖ IV/c : 2 orang
- ❖ IV/d : 1 orang

Golongan III sebanyak 93 orang, terdiri dari:

- ❖ III/a : 17 orang
- ❖ III/b : 28 orang
- ❖ III/c : 21 orang
- ❖ III/d : 27 orang

Golongan II sebanyak 35 orang, terdiri dari:

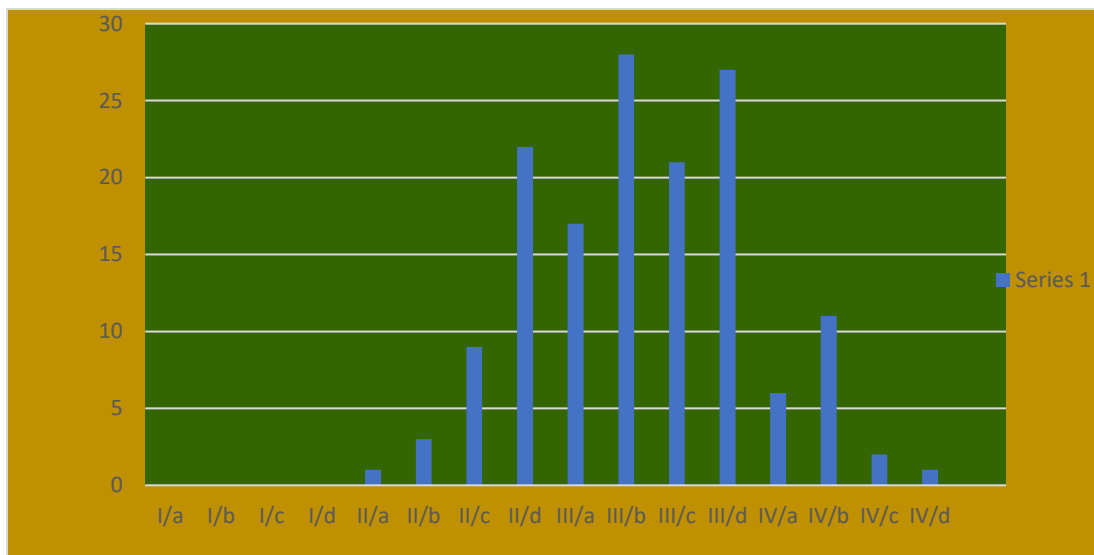
- ❖ II/a : 1 orang
- ❖ II/b : 3 orang
- ❖ II/c : 9 orang
- ❖ II/d : 22 orang

Golongan I sebanyak 0 orang, terdiri dari:

- ❖ I/a : -
- ❖ I/b :-
- ❖ I/c : -
- ❖ I/d : -

Total : 148 orang

Grafik 1.1
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SETDA Kabupaten Pati
Berdasarkan Golongan Tahun 2022



Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pegawai terbanyak di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah pegawai yang mempunyai golongan ruang yaitu III/b sebanyak 28 orang.

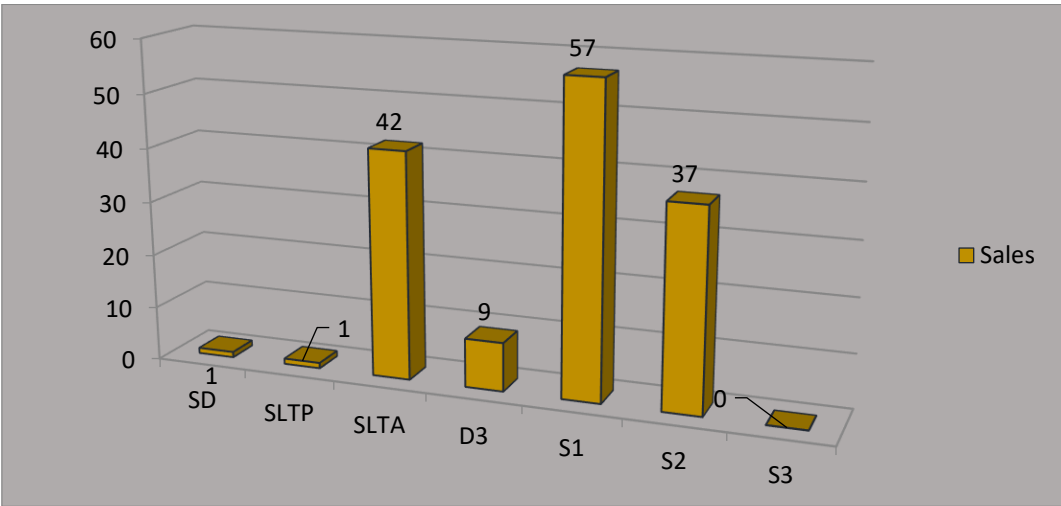
1) Berdasarkan pendidikan

- ❖ SD : 1 orang
- ❖ SLTP : 1 orang
- ❖ SLTA : 42 orang
- ❖ D3 : 9 orang
- ❖ S1 : 58 orang
- ❖ S2 : 37 orang



Jumlah : 148 orang

Grafik 1.2
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Dari tabel di bawah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang Pendidikan sebagian besar Pegawai di Lingkup kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah Strata 1 (S1) dengan persentase atau sebanyak 57 orang.

D. ASPEK STRATEGIS

D.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan Visi Bupati Pati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Merujuk pada visi di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sesuai kerangka tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke-4 Kabupaten Pati yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Mengutamakan Pelayanan Publik”**. Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan supaya responsif, dan akuntabel memberikan pelayanan publik yang humanis dan berkelanjutan, selaras dengan Tujuan dari Sekretariat Daerah yaitu **“Mewujudkan Rumusan Kebijakan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan SDM Yang Kompeten” Dan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Instansi Pemerintah”**.

D.2. TUJUAN

Agar pelaksanaan Misi dapat terarah dan tercapai dengan baik, maka harus pula ditetapkan tujuan, dengan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan Visi dan Misi dan meletakkan kerangka prioritas dan memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam pelaksanaannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tujuan, yaitu : Sekretariat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan harapan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator utamanya, berikut ini adalah Tujuan Utama Sekretariat Daerah:

- 1) Terwujudnya Rumusan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.

D.3. SASARAN

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tiga pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan tahun 2017-2022. Tiga pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati;
2. Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sub Bab ini menyajikan uraian jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2022.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Evaluasi Renja TW IV Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah didasarkan pada dokumen Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Dokumen Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran dan program. Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menargetkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja Tahun 2022 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) 2022. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih akuntabel dan SDM yang kompeten;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.

Selanjutnya Sekretariat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan Rumusan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	1. SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah kabupaten Pati	Nilai LKjIP 1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik 2. Nilai LPPD
		2. SASARAN STRATEGIS II Meningkatnya kuantitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1. Persentase Peraturan daerah yang disetujui bersama dengan Dewan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi Pemerintah	3. SASARAN STRATEGIS III Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik	IKM 1. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi 2. Efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah 3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 4. Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Tabel 2.2
Pemetaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Sasaran Strategis

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM SESUAI PERMEN 90	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BAGIAN
<u>TUJUAN 1</u> MEWUJUDKAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN SDM YANG KOMPETEN	NILAI LKjIP	1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)	1. Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra	1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kesra
<u>SASARAN 1</u> MENINGKATKAN KOORDINASI PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. PATI	1. PERSENTASE OPD YANG NILAI 2. AKIPNYA BERKRITERIA BAIK 3. NILAI LPPD		1. Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Penataan Administrasi Pemerintah 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Tata Pemerintahan

		2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (P.01)	1. Persentase peraturan bidang Organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	1. Kegiatan Penataan Organisasi	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Organisasi
		3. Program Perekonomian dan Pembangunan (P.03)	1. Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perekonomian
				2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Perekonomian
<u>SASARAN 2</u> MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERATURAN DAERAH YANG DISETUJUI BERSAMA DENGAN DEWAN	1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)	1. Persentase verifikasi draft dokumen hukum	1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Hukum

TUJUAN 2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSTANSI PEMERINTAH SASARAN 3 MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERTIB ADMINISTRASI EFISIENSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PERSENTASE OPD YANG PENGELOLAAN PUBLIKNYA BAIK PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH YANG AKTIF DIAKSES MASYARAKAT	1. Program Perekonomian dan Pembangunan (P.03)	1. Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% 1. Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyelesaian lelang oleh Pokja ULP	1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1. Pengelolaan Pengadaam Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Administrasi Pembangunan PBJ
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (P. 01)	1. Persentase Saluran Informasi Publik yang Masih Aktif	1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Fasilitasi Keprotokolan 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumnetasian Tugas Pimpinan	Prokompim

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Sekretariat Daerah Kab. Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 (Lampiran 1). Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja dan Target Sesuai Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati		Nilai LKjIP	68
		1.	Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%
		2.	Nilai LPPD	3 – 4
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1.	Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98 %
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik		IKM	3,5
		1.	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100%
		2.	Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5%
		3.	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100 %
		4.	Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100 %

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan per sasaran strategis Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI
TUJUAN 1 MEWUJUDKAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAANPEMERINTAH YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN SDM YANG KOMPETEN SASARAN 1 MENINGKATNYA KOORDINASI PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. PATI	NILAI LKJIP 1. PERSENTASE OPD YANG NILAI AKIPNYA BERKRITERIA BAIK 2. NILAI LPPD	1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)	1. Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1. Fasilitasi Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 8,778,276,000 ,- Rp. 7.936.276.000 ,- Rp. 252.000.000 ,-
			2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 590.000.000 ,-
			1. Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 1. Penataan Administrasi Pemerintah 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 1.707.072000 ,- Rp. 817.945.000 ,- Rp. 807.500.000 ,- Rp. 81.627.000 ,-
				Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Rp. 132.728.000 ,- Rp. 118.042.000 ,- Rp. 4.958.000 ,-
				3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 9.728.000 ,-
			2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Kegiatan Penataan Organisasi 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 815.175.000 ,- Rp. 288.655.000 ,-
					Rp. 162.000.000 ,-
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintah	1. Persentase peraturan bidang Organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti skdalam peraturan daerah		

		Daerah Kabupaten/ Kota (P.01)	2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
		3. Program Perekonomian dan Pembangunan (P.03)	1. Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 304.622.000 ,-
				4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 11.500.000 ,-
				5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 48.398.000 ,-
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 284.000.000 ,-
				1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 36.887.000,-
				2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 111.475.000 ,-
				3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 135.638.000,-
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 125.000.000 ,-
				1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 125.000.000,-
SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERATURAN DAERAH YANG DISETUJUI BERSAMA DENGAN DEWAN	1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)	1. Persentase verifikasi draft dokumen hukum	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.193.292.000,-
TUJUAN 2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSTANSI PEMERINTAH SASARAN 3 MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM 1. PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERTIB ADMINISTRASI	1. Program Perekonomian dan Pembangunan (P. 03)	1. Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 249.000.000 ,-
				2. Fasilitas Bantuan Hukum	Rp. 359.292.000 ,-
				3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 585.000.000,-
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 279.000.000 ,-
				1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 65.000.000 ,-
				2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 98.000.000 ,-
				3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 116.000.000 ,-

	2. EFISIENSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH 3. PERSENTASE OPD YANG PENGELOLAAN PUBLIKNYA BAIK 4. PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH YANG AKTIF DIAKSES MASYARAKAT		1. Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyelesaian lelang oleh Pokja ULP	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 125.000.000 ,-
				1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 83.200.000 ,-
				2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 41.800.000 ,-
		3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (P.03)	1. Persentase Saluran Informasi Publik yang Masih Aktif	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.734.274.000 ,-
				1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 152.000.000 ,-
				2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 117.000.000 ,-
				3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 2.465.274.000 ,-

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, jumlah anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 14.515.621.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.16.178.817.000,- terdiri atas Belanja Operasional dan Non Operasional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah melakukan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati kepada Bapak Bupati Pati Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Pada bab ini disajikan laporan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan indikator sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Pati yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik. Adapun IKU Sekretariat Daerah dan targetnya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati		Nilai LkjIP	68
		1.	Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%
		2.	Nilai LPPD	3 – 4
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1.	Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98 %
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik		IKM	3,5
		1.	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100 %
		2.	Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5 %
		3.	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100 %
		4.	Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100 %

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pati 2017-2022

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	<100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tahun 2022 adalah sebagai berikut :

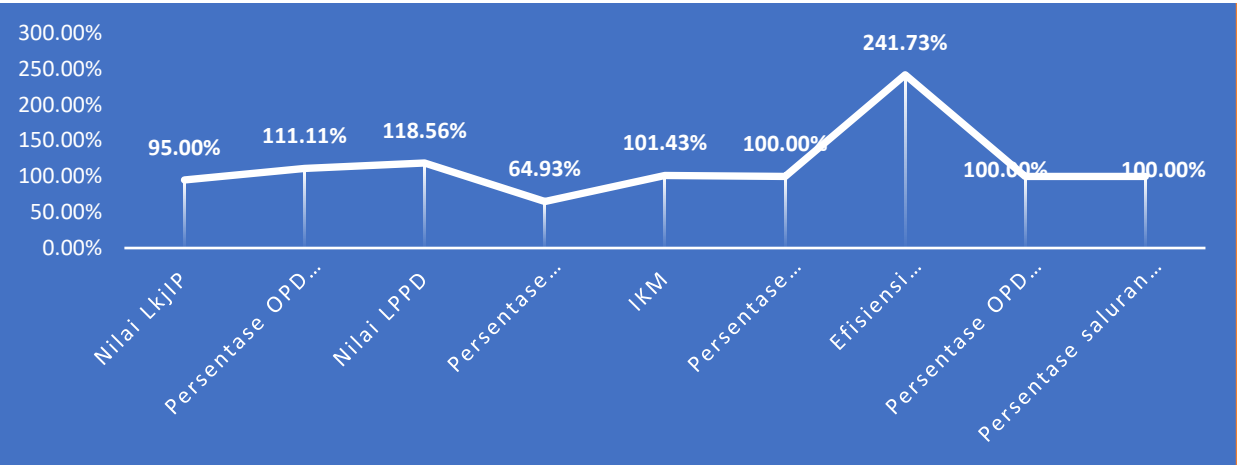
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	KATEGORI
					2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati		Nilai LkjIP	68	61,94	63,26	65,04	64,60	64,60*	95 %	TIDAK MENCAPAI TARGET
		1.	Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90 %	100%	100%	100%	100%	100 %	111,11 %	MELEBIHI TARGET
		2.	Nilai LPPD	3 – 4	3,47	3,31	3,55	3,55*	3,55*	118,56 %	MELEBIHI TARGET
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1.	Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98 %	160%	142,85%	88,80%	78,57%	63,63 %	64,93 %	TIDAK MENCAPAI TARGET
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik		IKM	3,5	3,07	3,3	3,3	3,4	3,55	101,43 %	MELAMPAUI TARGET
		1.	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	MENCAPAI TARGET
		2.	Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5 %	6,39%	12,90%	15,80%	23,23%	18,13 %	241,73 %	MELAMPAUI TARGET
		3.	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	MENCAPAI TARGET
		4.	Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100 %	100%	103,09%	100%	100%	100 %	100%	MENCAPAI TARGET

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, * : Nilai Tahun 2021, Nilai LPPD Tahun 2018, Nilai Tahun 2022 masih dalam proses olah data

Rata-rata Capaian IKU Setda pada Tahun 2022 sebesar 114,75 % atau melebihi target. Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022



Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap Sasaran Strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan :

1. Melakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu,
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
5. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis terhadap Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada masa akhir Renstra, disajikan sebagai berikut :

Sasaran I

"Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati"

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dengan indikator kinerja nilai LKjIP, Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik, dan nilai LPPD. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran 1 Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati diSekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tabel Pembanding Sasaran strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kab. Pati Jika dibandingkan dengan Tahun lalu

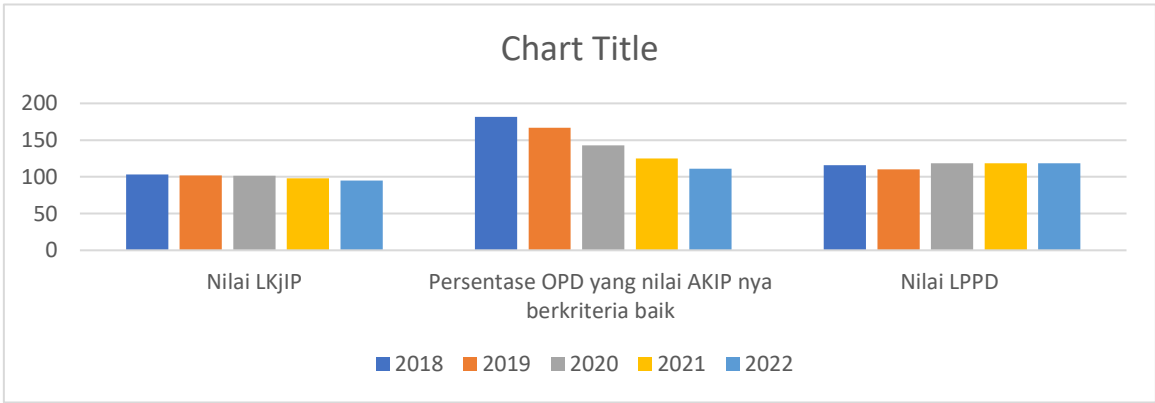
No	Sasaran Strategi I	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya Koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kab. Pati	Nilai LkjIP	68	61,94	63,26	65,04	64,60	64,60*	95 %	TIDAK MENCAPAI TARGET
		1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	MELAMPAUI TARGET
		2. Nilai LPPD	3-4	3,47	3,31	3,55	3,55*	3,55*	118,56%	MELAMPAUI TARGET

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

* : Capaian LkjIP Tahun 2021, Capaiani LPPD Tahun 2018, Capaian data Tahun 2022 masih dalam proses olah data

Grafik 3.2

Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis I Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 3.2 diatas nilai rata- rata dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 108,22% (melebihi/ melampaui target). Realisasi capaian Sasaran Startegis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati sebesar 108,22% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut

$$((95\% + 111,11\% + 118,56\%) \times 100) : 3 = 108,22\%.$$

2. Jika dibandingkan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Pati mengalami sedikit penurunan point penilaian dari 65,04 pada Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020 menjadi 64,60 pada Tahun 2021, sehingga ada penurunan sebesar 0,44 point. Kendati demikian Kabupaten Pati masih tetap pada predikat nilai B, dimana nilai B ada pada interval point 60 s/d 69. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pada dasarnya Kabupaten Pati sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Kabupaten Pati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut adalah upaya perbaikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah;
- Telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2023 - 2026;
- Meningkatkan kualitas pelaporan baik laporan monitoring triwulan, maupun laporan kinerja tahunan dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan dalam capaian kinerja, sehingga bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya;
- Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kabupaten Pati dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan, dan nantinya akan berpengaruh terhadap penyempurnaan implementasi SAKIP di Kabupaten Pati.

3. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai realisasi indikator kinerja pada sasaran strategi I Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah, ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Nilai LKjIP Tahun 2022. Hal ini Disebabkan oleh: Realisasi Nilai LKjIP yang disajikan pada Tahun 2022 adalah Realisasi Nilai LKjIP pada Tahun 2021, oleh karena capaian nilai LKjIP pada Tahun 2022 masih dalam proses olah data dan hasilnya akan di umumkan secara resmi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sampai dengan akhir Februari 2023, sekalipun terjadi penurunan Realisasi Capaian kinerja di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target, akan tetapi kami tetap optimis bahwa nilai LKjIP Kabupaten Pati di Tahun 2022 akan meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu ada 2 (dua) indikator yang capaiannya melampaui target yaitu nilai AKIP, dan nilai LPPD Kabupaten Pati. Nilai AKIP memperoleh 100% atau sebesar 111,11% dimana target pada Tahun 2022 adalah sebesar 90%. Selanjutnya untuk nilai LPPD pada Tahun 2022 sebesar 3,557% yakni masih mengikuti nilai LPPD pada tahun 2018, oleh karena nilai LPPD pada Tahun 2022 masih dalam proses olah data. Dengan demikian, 3 indikator kinerja (nilai LKjIP, nilai AKIP, dan nilai LPPD) tersebut harus tetap dipertahankan dan diusahakan untuk naik nilainya dari tahun ke tahun untuk dapat memenuhi target akhir Renstra sampai Tahun 2022. Untuk itu upaya – upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah yang dikoordinasi oleh Bagian Organisasi telah melaksanakan koordinasi dan mengintensifkan monitoring, pembinaan dan fasilitasi penyusunan LKjIP, melaksanakan fasilitasi kepada seluruh OPD untuk melengkapi dokumen AKIP secara lengkap meliputi dokumen renstra, IKU dan PK (Perjanjian Kinerja) sesuai prosedur, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah secara menyeluruh. Selain itu untuk memacu semangat Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan Kinerja mereka, Bagian Organisasi mengadakan lomba Penilaian Kinerja yang diikuti oleh 51 OPD. Dalam penilaian kinerja ini ada 4 (empat) aspek yang dinilai: SAKIP, Evaluasi Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan

suatu organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat dijadikan perbaikan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di Renstra perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Pati.

2. Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada OPD secara intensif. Nilai LPPD Kabupaten Pati yang dinilai di tingkat Nasional pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 3,55 dengan status kinerja ST (Sangat Tinggi), dimana dengan rentan Target 3-4.

Adapun strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 1 **"Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati"** ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Ada 6 (enam) kegiatan yang berasal dari 3 (tiga) program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 1 **"Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati"** diantaranya adalah :

Program

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Kegiatan

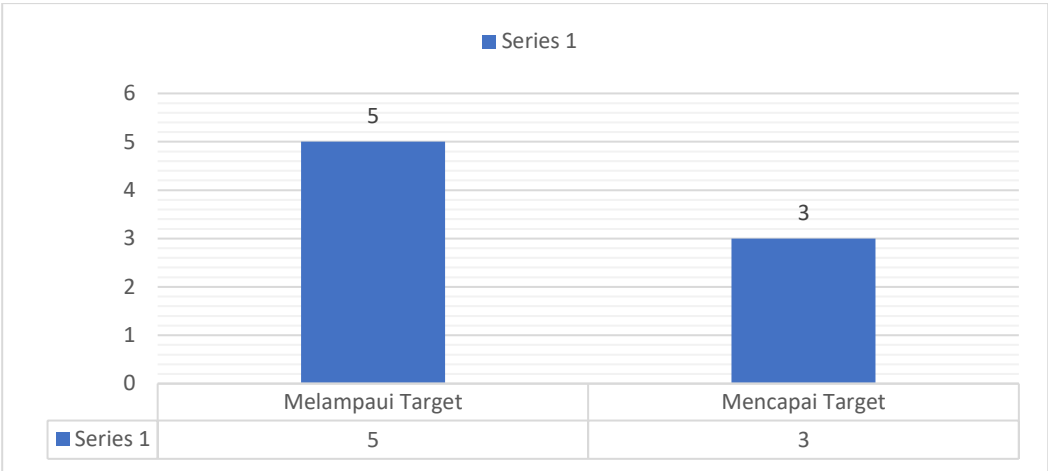
1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
2. Administrasi Tata Pemerintahan;
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
4. Penataan Organisasi;
5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
6. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022

No	Indikator Program	Formula	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori	Koordinator
1	Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang kesra yang sudah ditindaklanjuti dibanding jumlah peraturan pemerintah atas	100%	99%	100%	101,01%	Melampaui Target	Bagian Kesra
2	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra	Jumlah analisis bidang Kesra yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	83%	100%	120,48%	Melampaui Target	Bagian Kesra
3	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang Tata Pemerintahan daerah yang sudah tindak lanjuti dalam kebijakan daerah dibanding peraturan pemerintah atas	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Bagian Tapem
4	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Jumlah analisis bidang tata pemerintah daerah yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	95%	100%	105,26%	Melampaui Target	Bagian Tapem
5	Persentase peraturan bidang Organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dibanding jumlah peraturan pemerintah atas	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Bagian Organisasi
6	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	Jumlah analisis bidang Organisasi dan SDM yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	83%	100%	120,48%	Melampaui Target	Bagian Organisasi
7	Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dibanding jumlah peraturan pemerintah atas	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Bagian Perekonomian
8	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	Jumlah analisis bidang ekonomi yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	83%	100%	120,48%	Melampaui Target	Bagian Perekonomian

Sumber : Bagian di lingkungan Setd

Grafik 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati



Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1. PERSENTASE PERATURAN BIDANG KESRA YANG DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESRA	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jenis dokumen	9	9	100%	Bagian Kesra
2.PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISI KEBIJAKAN BIDANG KESRA	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi kepada jamaah haji Kabupaten Pati	Laporan	5	5	100%	Bagian Kesra
		Jumlah Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan hasil monev bantuan tempat ibadah	Laporan	12	12	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan kegiatan keagamaan	laporan	9	9	100%	Bagian Kesra
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang diselenggarakan	Laporan	6	6	100%	Bagian Kesra
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan update data bidang kesos	Laporan	6	6	100%	Bagian Kesra
		Jumlah sarana transportasi mudik lebaran yang tersedia	unit	10	10	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan studi komparatif	Laporan	1	1	100%	Bagian Kesra
	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	jumlah laporan hasil koordinasi P4GN	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan hasil koordinasi pencegahan HIV AIDS	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra

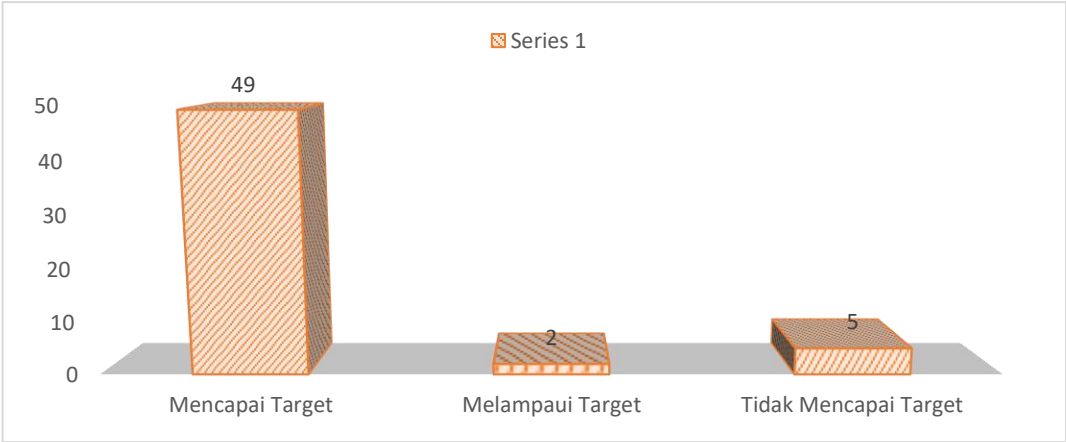
	Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan koordinasi bidang Kesehatan	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan kebijakan daerah bidang kesra	Dokumen	2	2	100%	Bagian Kesra
3. PERSENTASE PERATURAN BIDANG TATA PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	Jenis dokumen	3	3	100%	Bagian Tapem
4.PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG TATA PEMERINTAHAN	1. Penataan Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	2	2	100%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan PATEN	Laporan	1	2	100%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan rakor kewilayahan	Laporan	12	12	100%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan rakor pejabat PD	Laporan	12	9	75%	Bagian Tapem
		Jumlah Laporan SPM	Laporan	1	1	100%	Bagian Tapem
		Jumlah LKPJ Kepala Daerah	Dokumen	2	2	100%	Bagian Tapem
		Jumlah tayangan LPPD	Media	1	1	100%	Bagian Tapem
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah aparatur desa yang dibina	Desa	401	401	100%	Bagian Tapem
		Jumlah izin penataan dan pemanfaatan tanah kas desa	izin	20	76	380%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan monev pelaksanaan pilkades serentak	Jenis Dokumen	0	0	0%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan fasilitasi, koordinasi, dan monev pengisian perangkat desa	Desa	250	200	80%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan fasilitasi penanganan kasus penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan	5	5	100%	Bagian Tapem
		Jumlah rancangan peraturan tentang desa	Peraturan	2	2	100%	Bagian Tapem
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan yang dilaksanakan	Dokumen	5	5	100%	Bagian Tapem
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pendukung kegiatan pemilu	Laporan	2	2	100%	Bagian Tapem
		Jumlah peserta sosialisasi Kerjasama otonomi daerah	Orang	120	120	100%	Bagian Tapem
	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Jumlah fadilitasi Kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	2	100%	Bagian Tapem
	1. Fasilitasi KerjasamaDal am Negeri	Jumlah fasilitasi Kerjasama dalam negeri	Dokumen	20	20	100%	Bagian Tapem
	2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi Kerjasama luar negeri	Dokumen	1	1	100%	Bagian Tapem
	3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah laporan evaluasi Kerjasama	Laporan	2	2	100%	Bagian Tapem
PERSENTASE PERATURAN BIDANG ORGANISASI DAN SDM APARATUR YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM PERATURAN DAERAH	PENATAAN ORGANISASI	Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penataan organisais	Jenis dokumen	5	5	100%	Bagian Organisasi

PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG ORGANISASI DAN SDM	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Anjab, ABK, dan Evjab	Dokumen	2	2	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah dokumen draft Perda/Perbup Bidang Kelembagaan	kebijakan	5	5	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah laporan hasil monev kelembagaan	Laporan	1	1	100%	Bagian Organisasi
	2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah aturan pelayanan publik dan tata laksana	Peraturan	1	1	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah dokumen peningkatan implementasi bidang ketatalaksanaan	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	49	49	100%	Bagian Organisasi
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kebijakan pengukuran kinerja aparatur daerah dan pengembangan SDM	Kebijakan	1	1	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelaksanaan budaya kerja	PD	49	49	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelaksanaan manajemen kinerja	PD	49	49	100%	Bagian Organisasi
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi	PD	49	49	100%	Bagian Organisasi
	4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monev pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	Laporan	1	1	100%	Bagian Organisasi
PERSENTASI PERATURAN BIDANG EKONOMI YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jenis Dokumen	11	11	100%	Bagian Perekonomian
PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi dan pembinaan BUMD dan BLUD	Laporan	44	44	100%	Bagian Perekonomian
	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan/ analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Laporan	35	35	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi promosi daerah	Laporan	0	0	0%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi EKUINDA	Laporan	2	2	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan distribusi dan harga pupuk	Laporan	27	27	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan pengumpulan informasi dan sosialisasi tentang cukai	Laporan	4	4	100%	Bagian Perekonomian

		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan peredaran barang dan jasa	Laporan	30	30	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi TPKAD	Laporan	15	20	133,33%	Bagian Perekonomian
	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi pembinaan dan pengembangan LKM	Laporan	20	20	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pemantauan dan pengawasan dana bergulir dan koordinasi kredit program	Laporan	40	40	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan/ analisis hasil kordinasi pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Laporan	2	2	100%	Bagian Perekonomian
	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		Laporan	1	1	100%	Bagian Perekonomian
	1. Koordinasi , Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Dokumen	1	1	100%	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal	Laporan	1	0	0%	Bagian Perekonomian

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati



Berdasarkan Grafik 3.4 di atas Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terlihat bahwa dari 56 (lima puluh enam) indikator sub kegiatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) sub kegiatan dan 6 (enam) kegiatan, ada 2 (dua) indikator sub kegiatan yang melebihi target, 49 (empat puluh sembilan) indikator sub kegiatan yang mencapai target, dan 5 (lima) indikator sub kegiatan tidak mencapai target. Berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sub Kegiatan yang difocusing secara Total dan Indikator Sub Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2022 ada 2 (dua) Indikator Sub Kegiatan.

Pada Sasaran Strategis 1 "**Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati**" ada 2 (dua) indikator sub kegiatan yang persentase Realisasi Capaiannya kinerjanya sebesar 0% disebabkan karena **Tidak Ada Pelaksanaan pada Tahun 2022** sehingga sangat berpengaruh pada Realisasi Kinerja. 2 (dua) Kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan monev pelaksanaan pilkades serentak;
- b. Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi promosi daerah.

2. Jumlah Laporan Rakor Pejabat PD.

Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan rakor pejabat PD, hanya mencapai persentase sebesar 75% dari target 12 laporan hanya terealisasi; 9 laporan disebabkan karena indikator ini bersifat sediaan menyesuaikan petunjuk dari Pimpinan.

3. Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Monev Pengisian Perangkat Desa.

Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan fasilitasi, koordinasi, dan monev pengisian perangkat daerah hanya mencapai persentase sebesar 80% dari target 250 formasi hanya terealisasi 200 formasi disebabkan karena adanya desa yang formasi perangkatnya kosong tetapi tidak mengajukan formasi, dan ada pula desa yang mengajukan formasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan.

4. Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal.

Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal sebesar 0% dari target 1 laporan terealisasi 0 laporan disebabkan karena anggaran pada indikator sub kegiatan tersebut digeser ke Satpol PP oleh karena adanya Surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 perihal .

Sasaran II

“Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah Sasaran Persentase Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan Dewan. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran 2 sebagai berikut :

Tabel 3.6

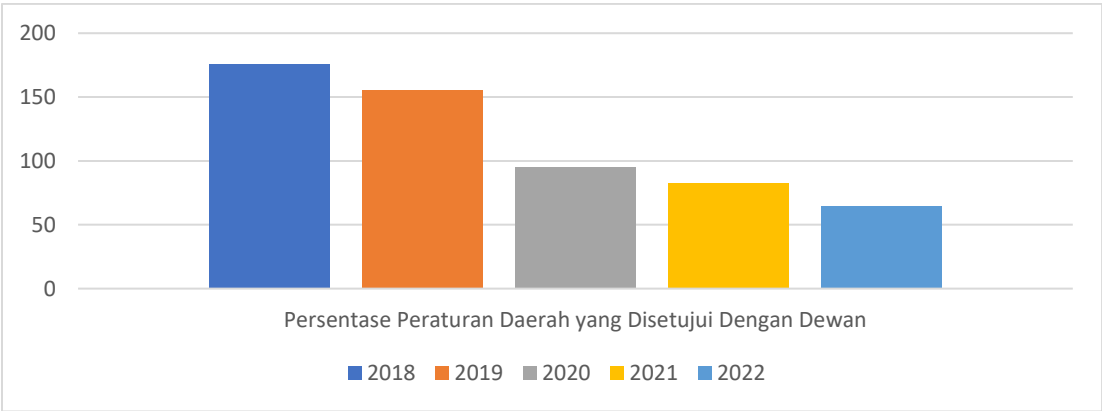
Tabel Perbandingan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2017-2022

No	Sasaran Strategi 2	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Peraturan Daerah Yang Disetujui Dengan Dewan	98%	160%	142,85 %	88,88 %	78,57 %	63,63 %	64,93%	TIDAK MENCAPAI TARGET

Sumber: bagian hukum setda kabupaten Pati

Grafik 3.5

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 3.5 diatas capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah adalah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 98%. Realisasi kinerja Sasaran Startegis 2 sebesar 64,93% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut :

Jumlah Raperda yang disetujui bersama Dewan

X 100 %

Jumlah Raperda dalam Pembahasan

= (7/11) X 100% = 63,63

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar 64,93% diperoleh dari :

= (Realisasi Kinerja/ Target Kinerja) X 100%= (63,63/98) x 100 % = 64,93%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Target dari indikator kinerja Persentase Peraturan Daerah yang Disetujui Bersama dengan Dewan pada Tahun 2022 adalah sebesar 98% dengan realisasi sebesar 63,63% yang berarti capaian kinerja indikator persentase peraturan daerah yang disetujui Bersama dengan Dewan **tidak mencapai target**. Hal ini disebabkan karena ada dari 3 (tiga) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dan 1 (satu) Raperda tealah difasilitasi Gubernur dalam proses persetujuan bersama. Berikut kami jelaskan dalam table di bawah ini:

Tabel 3.7
Daftar Raperda Tahun 2022

NO	PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	PERDA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH	Telah menjadi Produk Hukum
2	PERDA NO 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	Telah menjadi Produk Hukum
3	PERDA NO 3 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	Telah menjadi Produk Hukum
4	PERDA NO 4 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021	Telah menjadi Produk Hukum
5	PERDA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024	Telah menjadi Produk Hukum
6	PERDA NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022	Telah menjadi Produk Hukum
7	PERDA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2023	Telah menjadi Produk Hukum
8	RAPERDA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	Belum menjadi Produk Hukum tetapi telah difasilitasi

		Gubernur dan dalam proses persetujuan Bersama
9	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	Masih dalam pembahasan sampai dengan akhir 2022
10	RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PATI	Masih dalam pembahasan sampai dengan akhir 2022
11	RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN	Masih dalam proses persetujuan pembahasan oleh Mendagri

Sumber : Bag. Hukum Setda Kab.Pati

2. Jika dibandingkan antara capaian kinerja indikator kinerja Persentase Peraturan Daerah yang Disetujui Dengan Dewan Tahun 2021 realisasi Tahun 2022 adalah terjadi penurunan persentase dimana pada Tahun 2022 adalah sebesar 63,63% dan Tahun 2021 adalah sebesar 78,57%. Hal ini disebabkan karena terdapat substansi atau materi Raperda yang belum di capai kesepakatan dalam tahap pembahasan. Sebagai upaya tindak lanjut adalah:
 - ❖ Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terhadap permohonan persetujuan yang telah diajukan
 - ❖ Melakukan Koordinasi dan konsultasi ke Instansi terkait tentang substansi yang belum disepakati bersama dengan DPRD.
3. Jika dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat penurunan capaian mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dimana capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 88,88%, tahun 2021 sebesar 78,57%, dan tahun 2022 sebesar 63,63% hal ini disebabkan karena :
 - ❖ Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di wilayah Kabupaten Pati sejak awal tahun 2020 telah mengakibatkan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
 - ❖ Adanya paradigma kebijakan Pemerintah Pusat agar Daerah lebih selektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak menjadikan banyaknya perundang-undangan sebagai ukuran kinerja.
 - ❖ Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengharuskan Daerah untuk melakukan inventarisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah yang ada.
 - ❖ Tahun 2022 merupakan tahun transisi dimana masa jabatan Bupati Pati berakhir dan ditunjuk Penjabat Bupati Pati dimana untuk pembahasan dan

penandatanganan produk hukum Daerah oleh Penjabat Bupati Pati sesuai dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sehingga tahapan dalam proses Raperda harus mengikuti mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

- ❖ Terdapat substansi/ materi Raperda yang belum dicapai kesepakatan dalam tahap pembahasan.

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis II **“Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022”** ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah antara lain :

Program

Program Pemerintahan dan Kesra;

Kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;

Untuk mengukur realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Formula	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	PRESENTASE VERIFIKASI DRAFT DOKUMENTASI HUKUM	Jumlah produk hukum yang telah selesai diverifikasi menjadi produk hukum dibanding draft produk hukum yang diajukan /masuk	98%	100%	100%	99,36 %	98,82 %	98,67 %	100,68%	MELAMPAUI TARGET

Sumber : Bag. Hukum Setda Kab. Patii
 Dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

No	Produk Hukum	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Konsep Yang Masuk	Realisasi	Konsep Yang Masuk	Realisasi
1	Surat Keputusan	1254 Dokumen	1250 Dokumen	585 Dokumen	576 Dokumen
2	Raperbup	94 Dokumen	86 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen
JUMLAH		1348Dokumen	1336 Dokumen	675 Dokumen	666 Dokumen

Dengan perhitungan realisasi sebagai berikut:

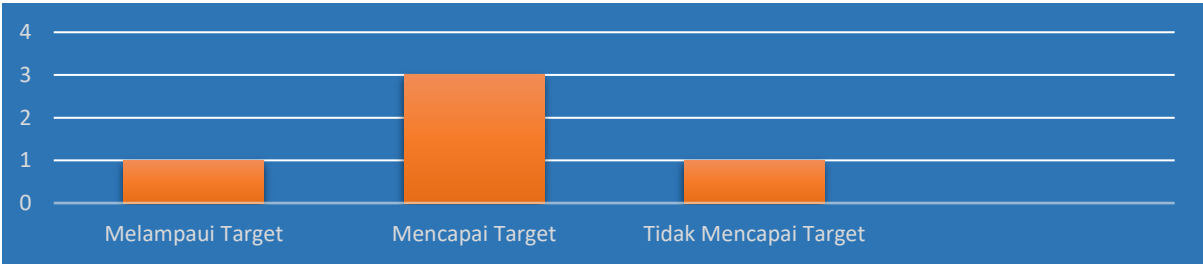
$$= (\text{Produk Hukum yang selesai diverifikasi} / \text{Produk Hukum yang masuk}) \times 100 = (666 / 675) \times 100 = 98,82\%.$$

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROSENTASE VERIFIKASI DRAFT DOKUMENTASI HUKUM	1. FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jenis dokumen	3	3	100%	Bagian Hukum
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda	Perda	7	11	157,14%	Bagian Hukum
		Jumlah SK Bupati	SK	1.050	675	64,29%	Bagian Hukum
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum masyarakat miskin	Kasus	12	10	83,33%	Bagian Hukum
		Jumlah kasus aparaturn	Kasus	3	2	66,67%	Bagian Hukum
	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku LD dan BD	Jenis	2	2	100%	Bagian Hukum
		Jumlah JDIH yang dikelola	Bulan	12	12	100%	Bagian Hukum
		Jumlah orang yang disosialisasi	orang	840	840	100%	Bagian Hukum

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Pati

Grafik 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2



Berdasarkan Grafik 3.6 dapat disimpulkan bahwa dari 7 Indikator Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Perumusan Kebijakan Daerah” ada 3 Indikator Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yaitu:

1. Indikator Kinerja Jumlah SK Bupati;

2. Indikator Kinerja Jumlah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;

3. Indikator Kinerja Jumlah Kasus Aparatur

Disebabkan dikarenakan ketiga indikator diatas bersifat sediaan sehingga realisasinya sesuai dengan konsep dan kasus yang masuk pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.

Sasaran III

“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah sasaran : Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik dengan indikator IKM, persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi, Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah, persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik, dan persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran Strategis 3 sebagai berikut :

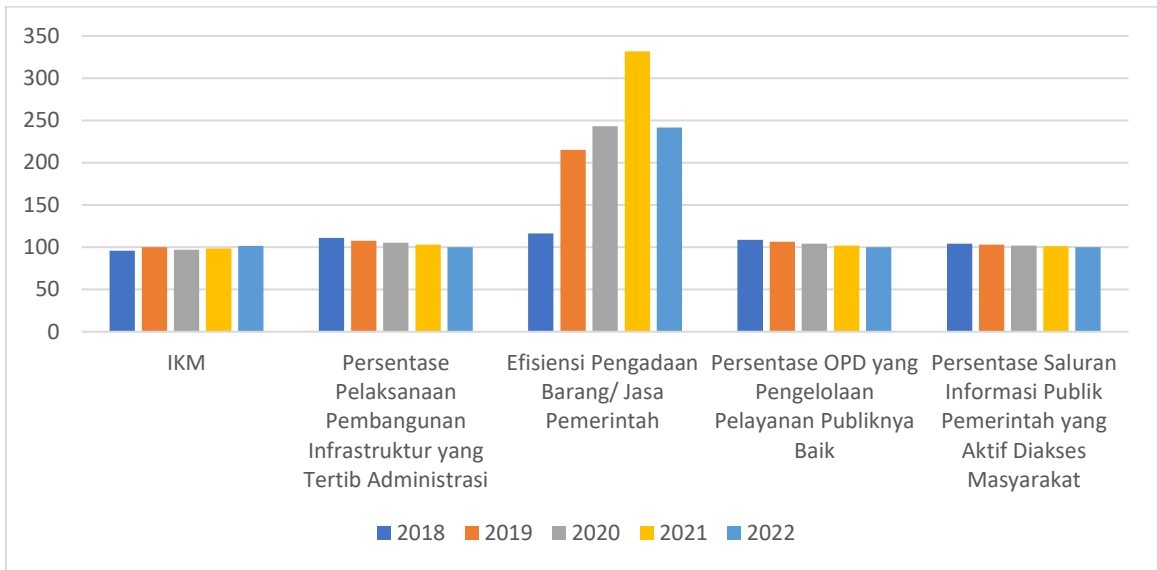
Tabel 3.10

Tabel Pembanding Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya Periode 2017-2022

No	Sasaran Strategi 3	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik		IKM	3,5	3,07	3,33	3,33	3,4	3,55	101,43%	MELAMPAUI TARGET
		1	Presentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100	100	100	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
		2	Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5	6,39	12,9	15,8	23,23	18,13	241,73%	MELAMPAUI TARGET
		3	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100	100	100	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
		4	Presentase saluran informasi public pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100	100	100	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.7
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3 Sekretariat
Daerah Kab. Pati Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 3.7 diatas capaian Sasaran Strategis 3: **“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”** telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 128,63% (melebihi/ melampaui target). Realisasi capaian sebesar 128,63% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut= (101,43% + 100% + 241,73% + 100% + 100%) :5 = 128,63%.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 5 (lima) indikator kinerja ada 2 (dua) indikator kinerja yang nilainya >100% yang artinya melampaui target dan ada 3 (tiga) indikator kinerja nilainya 100% yang artinya mencapai target.
2. Selama Periode Renstra 2017-2022 ada indikator yang paling menonjol perolehan realisasinya yaitu indikator kinerja **Efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah** dimana realisasi efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara nilai efisiensi dengan *total HPS Tender*. Sedangkan untuk mendapatkan nilai efisiensi diperoleh dari selisih antara total HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tender dikurangi total kontrak selama tahun 2022. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Total HPS tender}-\text{total kontrak})}{\text{Total HPS tender}} \times 100\% \\
 &= \frac{(129.492.062.650-106.020.047.068)}{129.492.062.650} \times 100\% \\
 &= 18,13\%
 \end{aligned}$$

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 3 ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 3 antara lain :

Program

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pengukuran realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis 3Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022

No	Indikator Program	Formula	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	PROSENTASE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SKPD YANG REALISASI KEGIATAN DI ATAS 90%	Jumlah OPD yang prosentase kegiatannya diatas 90% dibanding seluruh OPD yang melaksanakan kegiatan	100	-	100	78,43	87,75	89,79	89,79%	TIDAK MENCAPAI TARGET
2.	PERSENTASE PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG/ JASA YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)	Jumlah aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditindak lanjuti	100	-	-	-	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
3.	PERSENTASE PENYELESAIAN LELANG OLEH POKJA ULP	Jumlah paket lelang yang selesai dilelangkan dibanding jumlah seluruh rencana lelang yang diajukan	99	-	100	100	100	100	101,01%	MELAMPAUI TARGET

4.	PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK YANG AKTIF	Jumlah saluran informasi publik yang aktif diakses masyarakat dibanding seluruh saluran informasi publik yang dikelola Setda	100	88,82	103,09	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
----	---	--	-----	-------	--------	-----	-----	-----	------	-----------------

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Dari Tabel 3.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 4 (empat) indikator program yang ada pada Sasaran Strategi 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik ada 1 (satu) indikator program yang belum mencapai target **yaitu Prosentase Pengendalian Pembangunan SKPD yang Realisasi Kegiatan di Atas 90% dengan realisasi sebesar 89,79%** dari target sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena dari sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) OPD yang ada di Kabupaten Pati yang mempunyai nilai rata rata realisasi kegiatan di atas 90% hanya ada 44 (empat puluh empat) OPD disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

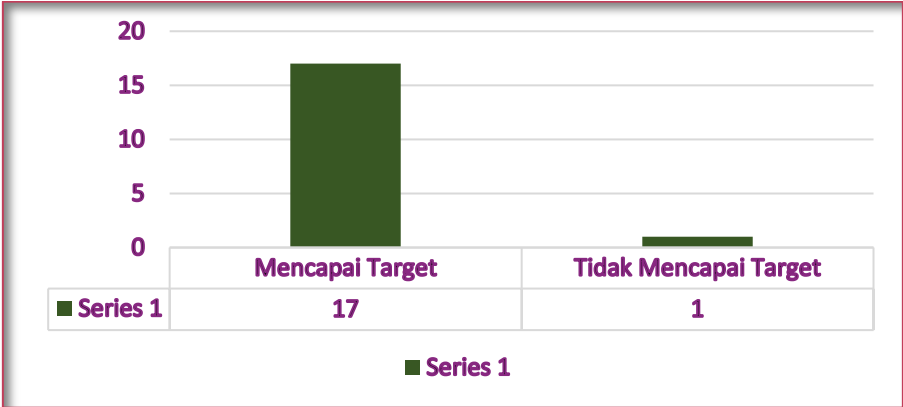
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
2	3	4	5	6	7	8	9
PROSENTASE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SKPD YANG REALISASI KEGIATAN DI ATAS 90%	1. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Jenis dokumen	3	3	100%	Bagian Adpemb
PERSENTASE PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG/ JASA YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100%	Bagian Adpemb
PERSENTASE PENYELESAIAN LELANG OLEH POKJA ULP	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen laporan money pembangunan infrastruktur	Laporan	1	1	100%	Bagian Adpemb
PERSENTASE SALURAN		Jumlah dokumen rakor POK	Dokumen	4	4	100%	Bagian Adpemb

INFORMASI PUBLIK YANG AKTIF	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan money pembangunan	laporan	33	33	100%	Bagian Adpemb
		Jumlah SMEP dan TEPPRA yang di Kelola	Laporan	12	3	25%	Bagian Adpemb
	2. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jenis Dokumen	2	2	100%	Bagian PBJ
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan money PBJ	Laporan	1	1	100%	Bagian PBJ
		Jumlah laporan strategis pengadaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100%	Bagian PBJ
		Jumlah paket yang dikelola ULP selama setahun	Paket	180	88	48,89%	Bagian PBJ
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan penggunaan dan pengelolaan LPSE	Laporan	12	12	100%	Bagian PBJ
		Jumlah pengembangan aplikasi SIM ULP	Paket	1	1	100%	Bagian PBJ
		Jumlah system informasi yang dikelola	Unit	2	2	100%	Bagian PBJ
		Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSE	Dokumen	17	17	100%	Bagian PBJ
	3. PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Jumlah fasilitasi keprotokolan dan kompim yang dihasilkan	Laporan kegiatan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	1. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokom;im
	2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan komunikasi pimpinan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan jenis informasi publikasi	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
		Jumlah laporan kgiatan KD dan WKD yang didokumentasikan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
		Jumlah laporan publikasi yang terpasang	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
		Jumlah laporan unit media elektronik yang dikelola	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim

Sumber : Bagian di lingkungan Setda

Grafik 3.8
Realisasi IndikatorKinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik



Berdasarkan grafik 3.8 diatas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik terlihat bahwa seluruh indikator sub kegiatan dengan total 18 (delapan belas) indikator sub kegiatan, ada sebanyak 16 (enam belas) indikator sub kegiatan yang mencapai target dan 2 (dua) indikator sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu

- 1. Indikator sub kegiatan jumlah paket yang dikelola ULP selama satu tahun** dengan perolehan capaian sebesar 48,89% dikarenakan bersifat sediaan sesuai dengan jumlah paket yang masuk dari OPD.
- 2. Indikator sub kegiatan jumlah SMEP dan TEPPRA yang dikelola** dengan perolehan capaian sebesar 25% dikarenakan aplikasi TEPPRA sementara dinonaktifkan dari pusat oleh karena adanya peralihan SIMDA yang lama ke SIMDA yang sudah terintegrasi.

EVALUASI KINERJA

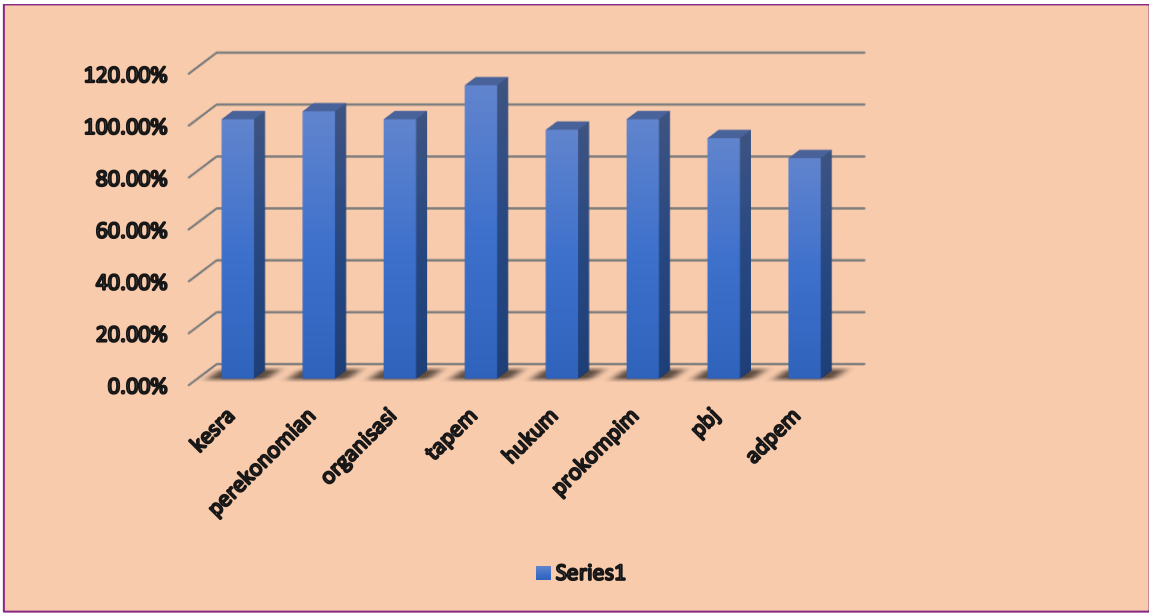
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari data yang kami peroleh, berikut tingkat capaian kinerja per bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Bagian

No	Bagian	Capaian Kinerja %	Tingkat Keberhasilan
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100%	BAIK
2	Bagian Perekonomian	103,03%	SANGAT BAIK
3	Bagian Organisasi	100%	BAIK
4	Bagian Tata Pemerintahan	113,05%	SANGAT BAIK
5	Bagian Hukum	95,92%	BAIK
6	Bagian Administrasi Pembangunan	85%	CUKUP
7	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	92,70%	BAIK
8	Bagian Prokompim	100 %	BAIK

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Grafik 3.9
Capaian Kinerja Bagian



Dari Grafik 3.9 dapat kita analisa bahwa ada masih ada beberapa indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi, yaitu indikator yang capaian kinerjanya belum mencapai target, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Yang Belum Mencapai Target

No	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Penyebab	Solusi ke Depan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peraturan Daerah yang Disetujui Bersama Dengan Dewan	Persentase	98	63,63	64,94%	Terdapat substansi/ materi Raperda yang belum dicapai kesepakatan dalam tahap pembahasan.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terhadap permohonan persetujuan yang telah diajukan; Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait tentang substansi yang belum disepakati dengan DPRD; Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara lebih cermat, sehingga dapat memenuhi target kinerja; Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun agar diperoleh <i>outcome</i> yang diharapkan; Dilakukan koordinasi yang lebih intens
2	Jumlah Laporan Rakor Pejabat PD	Laporan	12	9	75%	Bersifat sediaan sesuai dengan permintaan pimpinan	
3	Jumlah laporan fasilitasi ,koordinasi,dan monev pengisian perangkat desa	formasi	250	200	80%	Adanya Desa yang gagal dalam seleksi administrasi pengisian perangkat Desa	
4	Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC Ilegal	Laporan	1	0	0%	Anggaran digeser ke Satpol PP oleh karena adanya Surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022	
5	Jumlah SK Bupati	SK	1.050	675	64,29%	Bersifat sediaan sesuai dengan konsep SK yang masuk pada Bagian Hukum	
6	Jumlah Bantuan Hukum masyarakat miskin	Kasus	12	10	83,33%	Bersifat sediaan sesuai dengan kasus Hukum masyarakat miskin yang masuk pada Bagian Hukum.	
7	Jumlah Kasus Aparatur	Kasus	3	2	66,67%	Bersifat sediaan sesuai dengan kasus Hukum aparatur pada Bagian Hukum.	
8	Jumlah SMEP dan TEPPRA yang dikelola	Laporan	12	3	25%	aplikasi TEPPRA sementara dinonaktifkan dari pusat oleh karena adanya peralihan SIMDA yang lama ke SIMDA yang sudah terintegrasi.	
9	Jumlah paket yang dikelola ULP selama satu tahun	Paket	180	88	48,89%	Bersifat sediaan sesuai dengan paket yang masuk dari OPD.	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Merujuk pada kegiatan yang masih belum mencapai target, secara garis besar yang disebabkan oleh karena bersifat sediaan sehingga hal ini secara tidak langsung berpengaruh dalam pencapaian realisasi kinerja. Selain itu evaluasi atas perencanaan kinerja yang disusun dan ditetapkan agar target yang diharapkan dapat dicapai bahkan lebih. Langkah ke depan, dalam perencanaan perlu menetapkan target yang tepat dan selaras (sesuai dengan PK (Perjanjian Kinerja) dan Renstra Setda Kab. Pati tahun 2023-2026). Selain itu dalam menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, menetapkan indikator yang terukur dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan setelah adanya perubahan anggaran dapat digambarkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	REALISASI	%	BAGIAN
SASARAN I Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah kabupaten Pati	1. Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesra	Rp.7,593,276,000	Rp.8,778,276,000	Rp. 1,185,000,000	Rp. 7,418,647,102	84.51 %	Bagian Kesra
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.6,751,276,000	Rp. 7,936,276,000	Rp.1,185,000,000	Rp. 6,617,704,177	83,89%	Bagian Kesra
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp.252,000,000	Rp. 252,000,000	-	Rp. 231,823,475	91,99%	Bagian Kesra
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait masyarakat	Rp. 590,000,000	Rp. 590,000,000	-	Rp.569,119,450	96.46%	Bagian Kesra
	1. Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.1,707,072,000	Rp.1,707,072,000	-	Rp.1,616,103,134	94,67%	Bagian Tapem
		1. Penataan Administrasi Pemerintah	Rp. 817,945,000	Rp. 817,945,000	-	Rp. 804,827,325	98,40%	Bagian Tapem
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 807,500,000	Rp. . 807,500,000	-	Rp.745,430,150	92,31%	Bagian Tapem
		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 81,627,000	Rp. 81,627,000	-	Rp. 65,845,659	80,67%	Bagian Tapem
		2. Fasilitas Kerjasama Daerah	Rp.132,728,000	Rp. 132,728,000	-	Rp.120,314,200	90,65%	Bagian Tapem
		1. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 118,042,000	Rp. 118,042,000	-	Rp.107,633,750	91.18%	Bagian Tapem
		2. Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	Rp. 4,958,000	Rp. 4,958,000	-	Rp.3,404,000	68.66%	Bagian Tapem
		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 9,728,000	Rp. 9,728,000	-	Rp.9,276,450	95.36%	Bagian Tapem

	1. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	1. Penataan Organisasi	Rp.616,401,000	Rp815,175,000	Rp.198,774,000	Rp. 783,538,110	96.12%	Bagian Organisasi
	2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 179,881,000	Rp. 288,655,000	Rp.108,774,000	Rp. 284,229,915	98.47%	Bagian Organisasi
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.92,000,000	Rp. 162,000,000	Rp.70,000,000	Rp.155,605,766	96.05%	Bagian Organisasi
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.276,318,000	Rp.304,622,000	Rp.28,304,000	Rp.,288,910,204	94.84%	Bagian Organisasi
		4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp11,500,000	Rp. 11,500,000	-	Rp. 10,320,000	89.74%	Bagian Organisasi
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp56,702,000	Rp. 48,398,000	(Rp. 8,304,000)	Rp44,472,225	91.89%	Bagian Organisasi
	1. Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp.284,000,000	Rp.284,000,000	-	Rp.243,595,425	85,77%	Bagian Perekonomian
	2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.34,000,000	Rp.36,887,000	Rp.2,887,000	Rp. 35,998,750	97.59%	Bagian Perekonomian
		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 110,000,000	Rp. 111,475,000	Rp.1,475,000	Rp. 94,772,775,-	85.02%	Bagian Perekonomian
		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 140,000,000	Rp. 135,638,000	(Rp.4,362,000)	Rp. 112,823,900	83.18%	Bagian Perekonomian

		2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 125,000,000	Rp. 130,000,000	Rp. 5,000,000	Rp. 119,601,301	90,13%	Bagian Perekonomian
		1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 125,000,000	Rp. 130,000,000	Rp. 5,000,000	Rp. 119,601,301	90,13%	Bagian Perekonomian
JUMLAH SASARAN 1			Rp.10,458,477,000	Rp.11,847,251,000	Rp. 1,388,774,000	Rp.10,301,799,272	86,96%	
SASARAN 2 Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan Pemerintah daerah	1. Prosentase verifikasi draft dokumentasi hukum	1. Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp.1,187,800,000	Rp.1,193,292,000	Rp. 5,492,000	Rp. 820,369,010	68,75%	Bagian Hukum
		1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 249,000,000	Rp. 249,000,000	-	Rp. 184,169,035	73.96%	Bagian Hukum
		2. Fasilitas Bantuan Hukum	Rp. 443,800,000	Rp. 359,292,000	(Rp.84,508,000)	Rp. 124,500,450	34,65%	Bagian Hukum
		3. Pendokumentasian Produk Hukm dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 495,000,000	Rp. 585,000,000	Rp.90,000,000	Rp. 511,699,525	87.47%	Bagian Hukum
JUMLAH SASARAN 2			Rp.1,187,800,000	Rp. 1,193,292,000	Rp.5,492,000	Rp. 820,369,010	68,75 %	
SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	1. Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan di atas 90%	1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 269,000,000	Rp. 279,000,000	Rp.10.000.000	Rp.262,828,850	94,20%	Bagian Adpemb
		1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 65,000,000	Rp.65,000,000	-	Rp. 62,030,900	95,43%	Bagian Adpemb
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.98,000,000	Rp. 98,000,000	-	Rp. 90,576,150	92,42%	Bagian Adpemb
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 106,000,000	Rp. 116,000,000	Rp.10.000.0000	Rp. 110,221,800	95,02%	Bagian Adpemb

		Pelaksanaan Pembangunan						
	1. Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 125,000,000	Rp. 125,000,000	-	Rp. 113,117,080	90,50%	Bagian PBJ
	2. Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 77,200,000	Rp. 83,200,000	Rp.6,000,000	Rp. 72,787,500	87,48%	Bagian PBJ
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 47,800,000	Rp. 41,800,000	(Rp. 6,000,000)	Rp. 40,329,580	96,48%	Bagian PBJ
	1. Persentase saluran informasi publik yang aktif	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp.2,475,344,000	Rp.2,734,274,000	Rp.258,930,000	Rp. 2,669,910,929	97,65%	Bagian Prokompim
		1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 117,000,000	Rp. 152,000,000	Rp.35,000,000	Rp. 150,909,875	99,28%	Bagian Prokompim
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 117,000,000	Rp. 117,000,000	-	Rp. 110,467,100	94,42%	Bagian Prokompim
		3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp2,241,344,000	Rp. 2,465,274,000	Rp.223,930,000	Rp. 2,408,533,954	97,70%	Bagian Prokompim
	JUMLAH SASARAN 3		Rp.2,869,344,000	Rp.3,138,274,000	Rp.268,930,000	Rp. 3,045,856,859	97,05%	
	JUMLAH SASARAN 1,2, 3		Rp. 14,515,621,000	Rp. 16,178,817,000	Rp. 1,663,196,000	Rp. 14,168,025,141	87,57%	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Tabel 3.16
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR	KINERJA			ANGGARAN				
		KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU (Rp.)	PERUBAHAN	SELISIH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kab. Pati	1. Nilai LKJIP 2. Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik 3. Nilai LPPD	68 90% 3 – 4	64,60* 100% 3,557*	95% 111,11% 118,56%	Rp.10,458,477,000	Rp. 11,847,251,000	Rp.1,388,774,000	Rp.10,301,799,272	86,96%
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1. Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98%	63,63%	64,93%	Rp.1,187,800,000	Rp. 1,193,292,000	Rp.5,492,000	Rp.820,369,010	68,75%
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan public	1. IKM 2. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi 3. Efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah 4. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 5. Persentase saluran informasi public yang aktif diakses masyarakat	3,5 100% 7,5% 100% 100%	3,55 100% 18,13% 100% 100%	101,43% 100% 241,73% 100% 100%	Rp. 2,869,344,000	Rp.3,138,274,000	Rp.268,930,000	Rp. 3,045,856,859	97,05%
JUMLAH, Sasaran 1,2,3						Rp. 14,515,621,000	Rp.16,178,817,000	Rp. 1,663,196,000	Rp. 14,168,025,141	87,57%

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

: Nilai LKjIP Tahun 2021, Nilai LPPD Tahun 2018, Capaian Tahun 2022 masih tahap olah data.

Dari Tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.048.817.000 dengan realisasi Rp. 14.048.423.840-Dengan serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 87,54%. Dengan demikian pada tahun anggaran 2022 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.000.393.160

Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Masing-masing Bagian
Tahun Anggaran 2022

No	Bagian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	Capaian kinerja
1	Kesejahteraan Rakyat	7.593.276.000	8.778.276.000	7.418.647.102	15,49%	100%
2	Perekonomian	409.000.000	414.000.000	363.196.726	12,27%	103,03%
3	Organisasi	616.401.000	815.175.000	783.538.110	3,88%	100%
4	Tata Pemerintahan	1.839.800.000	1.839.800.000	1.736.417.334	5,62%	113,05%
5	Hukum	1.187.800.000	1.193.292.000	820.369.010	31,25%	95,92%
6	Administrasi Pembangunan	269.000.000	279.000.000	262.828.850	5,8%	85%
7	Prokompim	2.475.344.000	2.734.274.000	2.669.910.929	2,35%	100%
8	PBJ	125.000.000	125.000.000	113.117.080	9,5%	92,70%

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan wujud semangat akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efektif dan efisien. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran secara umum disebabkan oleh :

1. Mekanisme perencanaan yang jelas.
2. Memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan atas program yang telah dilaksanakan.
3. Melaksanakan pemantauan atas realisasi kegiatan baik dari sisi kinerja dan keuangan dalam setiap triwulan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan.

Adapun yang menjadi tantangan saat ini:

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan- persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan- tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan koordinasi dan penggalan berbagai masalah di masyarakat agar kebijakan tepat sasaran. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun

harus ada rencana dan upaya untuk menerapkan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hal ini akan menjadikan LKjIP benar- benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik semakin baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 ini disusun dan kiranya dapat menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pati.

Pati, Pebruari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEPATI



Drs. JUMANI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19701114 199011 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUMANI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Pati, 20 Januari 2022

Pihak Pertama
Drs. JUMANI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701114 199011 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	1.	Nilai LKjIP	68
		2.	Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%
		3.	Nilai LPPD	3-4
2.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	1.	Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98%
3.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	1.	IKM	3,5
		2.	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang Tertib Administrasi	100%
		3.	Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7,5
		4.	Persentase OPD yang Pengelolaan Pelayanan Publiknya Baik	100%
		5.	Persentase Saluran Informasi Publik Pemerintah yang Aktif Diakses Masyarakat	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.091.745.000,00	APBD Kabupaten
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 16.620.876.000,00	APBD Kabupaten
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 803.000.000,00	APBD Kabupaten


 Bupati Pati
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Pati, Januari 2022

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati


Drs. JUMANI, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701114 199011 1 001

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022 TRIWULAN IV

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu kepada sasaran RKPD:

A. Indikator Tujuan 1					: Nilai LKJIP					Target					1. Indikator Tujuan					: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Target					: 3,5					Nilai				
1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik					: 90					%					1. Persentase Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang tertib administrasi					: 100					Target					: 100					%				
2. Nilai LPPD					: 3-4					Nilai					2. Efisiensi pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah					: 7.5					Target					: 7.5					%				
3. Persentase Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan Dewan					: 98					%					3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik					: 100					Target					: 100					%				
															4. Persentase saluran informasi publik Pemerintah yang aktif diakses masyarakat										Target					: 100					%				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
												I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18	
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			
	--		Non Urusan																													
1	Meningkatnya kinerja pelayanan sebagai penunjang urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				144,760,087		82,380,623		40,236,686		5,586,540		12,798,181		7,825,783		10,723,595	-	36,934,099			91.79			119,314,721		82.42			
			I	Nilai Kinerja PD dan terselesaikannya Laporan Keuangan	Persen	100		100		100		0.00		100		100				100		100				100		100				
		4.1.1.2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen	90	524,143	72	212,187	12	79,291	3	20,805	3	18,129	3	8,816	3	25,642	12	73,392	100.00		92.56		84	285,579	93.33	54.48	Perenc & Keu		
		4.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	10	221,117	9	97,324	3	17,000	1	8,646	0	879	2	1,929	0	4,392	3	15,846	100.00	ST	93.21	ST	12	113,169	120.00	51.18	Perenc & Keu		
		4.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	20	303,026	13	76,261	1	14,000	0	748	0	8,299	1	1,040	0	3,093	1	13,180	100.00	ST	94.14	ST	14	89,441	70.00	29.52	Perenc & Keu		
		4.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	4	7,034	1	8,291	0	0	0	2,421	1	1,924	0	3,382	1	7,727	100.00	ST	93.20	ST	5	14,761	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi PD	Dokumen	8	0	4	25,950	3	33,000	1	10,538	1	5,639	1	2,160	0	11,733	3	30,069	100.00	ST	91.12	ST	7	56,019	87.50	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	Dokumen	8	0	4	5,620	4	7,000	1	874	1	891	1	1,763	1	3,042	4	6,570	100.00	ST	93.85	ST	8	12,190	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	93.10	ST				95.50	#DIV/0!			
		4.1.1.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Jenis Dokumen	25	2,815,022	20	16,854,950	5	17,193,817	1	3,489,643	0	4,448,151	0	4,406,487	4	3,562,091	5	15,906,372	100.00		92.51		25	32,761,322	100.00	1163.80			
		4.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	70	0	56	15,023,917	14	16,793,405	3	3,422,760	4	4,354,614	5	4,349,586	2	3,411,455	14	15,538,414	100.00	ST	92.53	ST	70	30,562,331	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	60	2,449,256	48	1,501,375	12	227,412	3	34,505	3	55,899	3	21,790	3	90,908	12	203,102	100.00	ST	89.31	T	60	1,704,477	100.00	69.59	Perenc & Keu		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan			
										I		II		III		IV			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)	K
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)		
		4.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan PD	Dokumen	24	0	12	129,675	12	125,000	3	27,406	3	27,737	3	26,930	3	35,959	12	118,032	100.00	ST	94.43	ST	24	247,707	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
		4.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	20	365,766	14	158,920	1	10,000	1	1,958	0	0	0	0	0	7,659	1	9,617	100.00	ST	96.17	ST	15	168,537	75.00	46.08	Perenc & Keu	
		4.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan dan perkembangan PD	Laporan	36	0	18	41,064	18	38,000	4	3,015	5	9,900	4	8,182	5	16,111	18	37,207	100.00	ST	97.91	ST	36	78,271	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	94.07	ST			95.00	#DIV/0!			
		4.1.1.2.03	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis Dokumen	10	0	8	70,233	12	68,000	3	17,106	3	16,249	3	8,900	3	22,646	12	64,900	100		95.44		20	135,133	200.00	#DIV/0!		
		4.1.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD pada PD	Dokumen	24	0	12	70,233	12	68,000	3	17,106	3	16,249	3	8,900	3	22,646	12	64,900	100.00	ST	95.44	ST	24	135,133	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	95.44	ST			100.00	#DIV/0!			
			II	Prosentase Ketersediaan Pakaian Dinas Aparatur	Persen	100		100		100		0		0		0		100		100		100			0		0				
			III	Persentase bagian yang telah melaksanakan peningkatan sumberdaya aparatur	Persen	25		25		25		0		25		25		25		25		100			25		100				
		4.1.1.2.05	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis Dokumen	15	1,573,303	12	938,595	3	369,400	0	0	0	8,268	0	179,538	3	151,557	3	339,363	100.00		91.87		15	1,277,957	100.00	81.23		
		4.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	80	941,973	64	473,555	20	36,400	0	0	0	0	0	0	20	35,100	20	35,100	100.00	ST	96.43	ST	84	508,655	105.00	54.00	Umum	
		4.1.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Selama Setahun	Dokumen	48	91,557	24	23,117	12	3,000	3	0	3	300	3	375	3	1,020	12	1,695	100.00	ST	56.50	R	36	24,812	75.00	27.10	Umum	
		4.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Selama Setahun	Orang	80	539,773	50	87,277	4	30,000	0	0	2	7,000	0	0	1	607	3	7,607	75.00	S	25.36	SR	53	94,884	66.25	17.58	Umum	sesuai kebutuhan
		4.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah laporan publikasi ketentuan di bidang cukai	Paket	5	0	4	354,646	1	300,000	0	0	0	968	1	179,163	0	114,830	1	294,961	100.00	ST	98.32	ST	5	649,607	100.00	#DIV/0!	Prokompim	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					95.00	ST	69.62	S			86.56	#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan				
												I		II														III		IV	
						1	2	3	4	5	5.A	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			K		Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)
		4.1.1.2.06	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	45	26,974,667	36	17,504,500	9	3,657,502	1	522,477	0	731,830	0	836,773	8	1,202,859	9	3,293,939	100.00		90.06		45	20,798,439	100.00	77.10		
		4.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dokumen	60	526,504	48	377,171	12	59,001	3	19,487	3	18,245	3	14,306	3	6,392	12	58,430	100.00	ST	99.03	ST	60	435,600	100.00	82.73	Umum	
		4.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	50	987,629	33	2,596,614	7	167,895	7	153,395	0	0	0	0	0	0	7	153,395	100.00	ST	91.36	ST	40	2,750,009	80.00	278.45	Umum	
		4.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun	Jenis	35	440,990	22	421,496	6	65,760	2	9,105	0	0	0	33,800	4	9,795	6	52,700	100.00	SR	80.14	T	28	474,196	80.00	107.53	Umum	Sesuai kebutuhan
		4.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun	Laporan/kegiatan	60	8,527,150	48	5,795,526	12	1,504,107	3	182,559	3	358,302	3	235,277	3	499,438	12	1,275,576	100.00	ST	84.81	T	60	7,071,102	100.00	82.92	Umum	
		4.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	Dokumen	60	1,648,377	48	782,725	12	147,558	3	9,404	3	26,243	3	43,992	3	58,275	12	137,913	100.00	ST	93.46	ST	60	920,638	100.00	55.85	Umum	
		4.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,632,238		1,214,747		395,649		60,745		59,744		59,650		190,732		370,871			93.74	ST		1,585,618		97.14	Umum	
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar / Dokumen	3720	526,360	3048		744		186		186		186		186		744		100.00	ST			3792		101.94		Umum	
				Jumlah dokumen standar satuan harga	Dokumen	10	1,105,878	8		2		0		0		2		0		2		100.00	ST			10		100.00		Umum	
		4.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Laporan/ kegiatan	60	7,883,040	48	3,500,182	12	841,924	3	51,607	3	182,866	3	297,954	3	251,097	12	783,524	100.00	ST	93.06	ST	60	4,283,706	100.00	54.34	Umum	
		4.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	Laporan/ kegiatan	60	5,328,739	48	2,787,957	12	465,608	3	36,177	3	78,893	3	151,794	3	184,690	12	451,553	100.00	ST	96.98	ST	60	3,239,510	100.00	60.79	Perenc & Keu	
		4.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD	Dokumen bagian	20	0	10	28,084	10	10,000	0	0	0	7,538	8	0	2	2,440	10	9,978	100.00	ST	99.78	ST	20	38,062	100.00	#DIV/0!	Umum	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	92.48	ST			96.19	#DIV/0!			
		4.1.1.2.07	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	10	1,411,527	8	3,296,690	3	7,775,988	1	19,866	0	5,157,715	0	0	2	1,856,400	3	7,033,981	100.00		90.46		11	10,330,671	110.00	731.88		
		4.1.1.2.07.5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	16	6,119,200	11	4,745,999	22	7,672,838	0	0	18	5,085,000	0	0	4	1,850,500	22	6,935,500	100.00	ST	90.39	ST	33	11,681,499	206.25	190.90	Umum	
		4.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Jenis	11	451,625	10	672,510	1	20,000	1	19,866	0	0	0	0	0	0	1	19,866	100.00	ST	99.33	ST	11	692,376	100.00	153.31	Umum	
		4.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	Jenis	25	959,902	22	2,624,181	7	83,150	0	0	6	72,715	0	0	1	5,900	7	78,615	100.00	ST	94.55	ST	29	2,702,795	116.00	281.57	Umum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	94.76	ST			140.75	208.59			
			IV	Prosentase ketercukupan pelayanan persuratan	Persen	100		100		100		0		72.39		92.39		119.25		119.25		119.25				92.39		92.39			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan					
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13			16=15/6*100				
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)			K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18
		4.1.1.2.08	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	20	11,549,011	16	7,303,196	4	2,499,148	0	515,375	0	540,882	0	471,359	4	732,800	4	2,260,415	100.00		90.45		20	9,563,611	100.00	82.81		
		4.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	Surat	50,000	647,964	41,313	319,162	10,000	26,000	3,567	4,790	3,672	9,800	2000	0	2,686	11,400	11,925	25,990	119.25	ST	99.96	ST	53,238	345,152	106.48	53.27	Umum	
		4.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	Bulan	60	6,715,610	48	3,411,214	12	982,633	3	168,582	3	189,676	3	128,756	3	321,066	12	808,080	100.00	ST	82.24	T	60	4,219,294	100.00	62.83	Umum	
		4.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	Bulan	60	753,882	48	362,885	12	100,555	3	12,165	3	20,565	3	7,865	3	55,823	12	96,418	100.00	ST	95.89	ST	60	459,302	100.00	60.92	Umum	Sesuai kebutuhan
		4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum (pendukung administrasi teknis/ keamanan)	Dokumen	60	3,431,555	48	3,209,935	12	1,389,960	3	329,838	3	320,842	3	334,738	3	344,511	12	1,329,928	100.00	ST	95.68	ST	60	4,539,863	100.00	132.30	Perenc & Keu	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					104.81	ST	93.44	T			101.62	77.33			
		V	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Persen	95		100		90		0		100		100		100		100		111.11				100		111.11				
		4.1.1.2.09	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	30	19,677,520	24	11,707,085	6	1,704,919	1	129,010	0	231,104	0	312,287	5	954,181	6	1,626,581	100.00		95.41		30	13,333,665	100.00	67.76		
		4.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan selama setahun	Unit	20	579,679	16	434,058	4	124,360	4	21,747	0	26,273	0	17,450	0	46,972	4	112,442	100.00	ST	90.42	ST	20	546,500	100.00	94.28	Umum	
		4.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10,387,373		5,876,288		864,291		79,492		161,463		280,035		311,227		832,216			96.29	ST		6,708,504		64.58	Umum	
				Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	Unit	545	5,465,974	436		124		10		34		35		45		124		100.00	ST			560		102.75	Umum		
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	535	3,648,383	510		120		41		19		28		32		120		100.00	ST			630		117.76	Umum		
				Jumlah polis asuransi barang milik daerah yang mendapatkan jaminan selama setahun	Polis	195	1,273,016	159		41		0		41		0		0		41		100.00	ST			200		102.56	Umum		
		4.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur selama setahun	Paket	1,055	312,581	585	179,845	7	36,000	0	0	2	7,250	0	0	5	21,745	7	28,995	100.00	ST	80.54	T	592	208,840	56.11	66.81	Umum	Sesuai kebutuhan
		4.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7,370,987		4,622,118		514,758		0		0		0		508,343		508,343			98.75	ST		5,130,461		69.60	Umum	
				Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	Paket	20	4,867,798	7		3		0		0		0		3		3		100.00	ST			10		50.00	Umum		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan				
												I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		
				Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama setahun	Paket	5	671,659	5		1		0		0		0		0		0		0.00	SR			5		100.00		Umum	digeser pada perubahan
				Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan selama setahun	Paket	10	1,831,530	8		2		0		0		0		0		0		0.00	SR			8		80.00		Umum	digeser pada perubahan
		4.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Item	60	724,224	42	437,257	31	97,210	7	22,731	7	20,713	4	10,747	13	26,140	31	80,330	100.00	ST	82.64	T	73	517,587	121.67	71.47	Umum	
		4.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	15	302,676	12	157,518	4	68,300	1	5,040	2	15,405	0	4,055	1	39,755	4	64,255	100.00	ST	94.08	ST	16	221,773	106.67	73.27	Umum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	88.79	T			93.75	73.34			
			VI	Persentase agenda kerja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	Persen	100		100		100		0		100		100		100		100		100			100		100				
		4.1.1.2.11	1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen	60	6,964,357	48	4,327,353	12	1,884,405	3	290,863	3	505,189	3	471,198	3	282,992	12	1,550,242	100.00		82.27		60	5,877,595	100.00	84.40		
		4.1.1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen gaji tunjangan KD dan WKD	Dokumen	70	0	56	773,575	14	669,775	3	187,103	3	198,525	6	163,658	2	82,500	14	631,786	100.00	ST	94.33	ST	70	1,405,361	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
		4.1.1.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tahun	1	0	0	0	1	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	SR	0.00	SR	0	0	0.00	#DIV/0!	Umum	Sifatnya persediaan, Sub kegiatan baru sehingga di Renstra tidak ada
		4.1.1.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	60	6,964,357	48	3,553,778	12	1,210,630	3	103,760	3	306,663	3	307,540	3	200,492	12	918,455	100.00	ST	75.87	T	60	4,472,233	100.00	64.22	Umum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	85.10	T			100.00	#DIV/0!			
		4.1.1.2.12	2. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan kegiatan	60	8,032,853	48	5,107,912	12	1,454,767	3	233,131	3	442,813	3	235,907	3	419,615	12	1,331,466	100.00		91.52		60	6,439,378	100.00	80.16		
		4.1.1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	60	4,242,259	48	2,492,845	12	442,867	3	85,788	3	179,544	3	33,676	3	118,170	12	417,177	100.00	ST	94.20	ST	60	2,910,021	100.00	68.60	Umum	
		4.1.1.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	60	0	48	340,681	12	228,000	3	55,508	3	114,306	3	56,168	3	0	12	225,982	100.00	ST	99.11	ST	60	566,663	100.00	#DIV/0!	Umum	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
		4.1.1.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	180	3,790,594	153	2,274,387	12	783,900	3	91,835	3	148,963	3	146,064	3	301,445	12	688,307	100.00	ST	87.81	T	165	2,962,694	91.67	78.16	Umum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	93.71	ST			97.22	#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
						I	II	III	IV	I	II	III	IV																			
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18	
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			
			VII	Prosentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah	Persen	100		100		100		0		80		100		100		100		100				100		100				
			VIII	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	Persen	85		100		83		0		88.88		100		100		100		100				100		117.65				
		4.1.1.2.13	1. Penataan Organisasi	Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penataan organisasi	Jenis dokumen	25	5,509,912	20	1,542,633	5	815,175	1	71,192	0	88,939	4	110,484	0	512,922	5	783,538	100.00		96.12		25	2,326,171	100.00	42.22			
		4.1.1.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1,830,789		698,851		288,655		41,821		51,357		39,917		151,135		284,230			98.47	ST		983,081		53.70	Organisasi		
				Jumlah dokumen Anjab, ABK, dan Evjab	Dokumen	10	648,000	8		2		1		1		0		0		2		100.00	ST			10		100.00		Organisasi		
				Jumlah dokumen draft Perda/ Perbup Bidang Kelembagaan	Kebijakan	30	807,789	15		5		3		1		1		0		5		100.00	ST			20		66.67		Organisasi		
				Jumlah laporan hasil money kelembagaan	Laporan	10	375,000	9		1		1		0		0		0		1		100.00	ST			10		100.00		Organisasi		
		4.1.1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1,484,020		300,951		162,000		3,520		14,443		22,038	0	115,604		155,606			96.05	ST		456,556		30.76	Organisasi		
				Jumlah aturan pelayanan publik dan tata laksana	Peraturan	5	195,000	4		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			5		100.00		Organisasi		
				Jumlah dokumen peningkatan implementasi bidang ketatalaksanaan	Dokumen	2	375,000	1		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			2		100.00		Organisasi		
				Jumlah laporan survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	100	914,020	64		49		0		0		49		0		49		100.00	ST			113		113.00		Organisasi		
		4.1.1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1,582,491		358,773		304,622		9,111		18,413		21,358		240,029		288,910			94.84	ST		647,684		40.93	Organisasi		
				Jumlah kebijakan pengukuran kinerja aparatur daerah dan pengembangan SDM	Kebijakan	5	763,213	3		1		0		0		1		0		1		100.00	ST			4		80.00		Organisasi		
				Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi pelaksanaan Budaya Kerja	PD	245	247,922	196		49		0		49		0		0		49		100.00	ST			245		100.00		Organisasi		
				Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi pelaksanaan Manajemen Kinerja	PD	245	216,211	196		49		0		49		0		0		49		100.00	ST			245		100.00		Organisasi		
				Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PD	245	355,145	196		49		0		49		0		0		49		100.00	ST			245		100.00		Organisasi		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan				
						I	II	III	IV	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18
		4.1.1.2.13.4	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monev pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	2	0	1	4,450	1	11,500	0	3,313	0	0	1	6,812	0	196	1	10,320	100.00	ST	89.74	T	2	14,770	100.00	#DIV/0!	Organisasi	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
		4.1.1.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	5	612,612	4	179,608	1	48,398	1	13,428	0	4,726	0	20,360	0	5,959	1	44,472	100.00	ST	91.89	ST	5	224,080	100.00	36.58	Organisasi	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	94.20	ST			96.64	#DIV/0!			
			IX	Persentase saluran informasi publik yang aktif	Persen	100		100		100		0		100		100		100		100		100			100		100				
		4.1.1.2.14	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan dan kompim yang dihasilkan	Laporan kegiatan	60	59,727,772	48	13,515,288	12	2,734,274	3	277,072	3	608,914	3	784,034	3	999,891	12	2,669,911	100.00		97.65		60	16,185,199	100.00	27.10		
		4.1.1.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	60	897,152	48	576,645	12	152,000	3	15,856	3	42,583	3	12,538	3	79,934	12	150,910	100.00	ST	99.28	ST	60	727,555	100.00	81.10	Prokompim	
		4.1.1.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan komunikasi pimpinan	Laporan	60	3,239,500	48	486,921	12	117,000	3	15,715	3	21,028	3	33,735	3	39,988	12	110,467	100.00	ST	94.42	ST	60	597,388	100.00	18.44	Prokompim	
		4.1.1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				55,591,120		12,451,722		2,465,274		245,501		545,303		737,762		879,969		2,408,534			97.70	ST		14,860,256		26.73	Prokompim	
				Jumlah laporan jenis informasi publikasi	Laporan	60	8,603,302	48		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			60		100.00		Prokompim	
				Jumlah laporan kegiatan WD dan WKD yang didokumentasikan	Laporan	60	4,490,736	48		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			60		100.00		Prokompim	
				Jumlah laporan publikasi yang terpasang	Laporan	60	36,316,457	48		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			60		100.00		Prokompim	
				Jumlah laporan unit media elektronik yang dikelola	Laporan	60	6,180,625	48		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			60		100.00		Prokompim	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	97.13	ST			100.00	42.09			
		4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				70,087,456		30,627,330		11,811,368		519,124		4,126,343		2,115,242		3,214,724		9,975,433			84.46			40,602,764		57.93		
			I	Prosentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Persen	95		100		95		0		90		90		100		100		105.26			90		94.74				
		4.1.2.2.01	1. Administrasi Tata Pmerintahan	Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Jenis Dokumen	15	20,538,700	12	10,007,763	3	1,707,072	0	318,549	0	555,259	0	135,581	3	606,714	3	1,616,103	100.00		94.67		15	11,623,866	100.00	56.59		
		4.1.2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintah				13,155,472		6,620,015		817,945		278,202		228,311		98,331		199,984		804,827			98.40	ST		7,424,842		56.44	Tapem	
				Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	10	7,031,735	8		2		2		0		0		0		2		100.00	ST			10		100.00		Tapem	
				Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan PATEN	Laporan	10	482,374	8		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			9		90.00		Tapem	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan			
												I		II		III		IV															
						1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9			10		11		12						13=9+10+11+12		14=13/8*100
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		
				Jumlah laporan rakor kewilayahan	Laporan	240	3,234,743	140		12		2		4		3		3		12		100.00	ST			152		63.33		Tapem			
				Jumlah laporan rakor pejabat PD	Laporan	30	617,499	23		12		3		1		2		3		9		75.00	S			32		106.67		Tapem	sesuai kebutuhan		
				Jumlah laporan SPM	Laporan	1	0	0		1		1		0		0		0		1		100.00	ST			1		100.00		Tapem			
				Jumlah LKPJ Kepala Daerah	Dokumen	10	1,219,872	8		2		2		0		0		0		2		100.00	ST			10		100.00		Tapem			
				Jumlah tayangan LPPD	Media	10	569,249	7		1		1		0		0		0		1		100.00	ST			8		80.00		Tapem			
		4.1.2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6,071,231		2,957,749		807,500		32,071		321,226		27,035		365,099		745,430			92.31	ST		3,703,179		61.00	Tapem			
				Jumlah aparatur desa yang dibina	Desa	1,095	2,351,677	1,142		401		0		0		401		0		401		100.00	ST			1,543		140.91		Tapem			
				Jumlah izin penataan dan pemanfaatan tanah kas desa	Izin	100	118,175	80		20		20		0		56		0		76		380.00	ST			156		156.00		Tapem	Sesuai ijin yang masuk		
				Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan monev pelaksanaan PilkaDes serentak	Jenis dokumen	1,095	2,119,995	522		0		0		0		0		0		0		0.00	SR			522		47.67		Tapem	Tidak ada pelaksanaan di tahun 2022		
				Jumlah laporan fasilitasi, koordinasi dan monev pengisian perangkat desa	Desa	150	566,291	89		250		200		0		0		0		200		80.00	T			289		192.67		Tapem			
				Jumlah laporan fasilitasi penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa	Laporan	25	470,093	35		5		5		0		0		0		5		100.00	ST			40		160.00		Tapem			
				Jumlah rancangan peraturan tentang desa	Peraturan	10	445,000	9		2		0		0		0		2		2		100.00	ST			11		110.00		Tapem			
		4.1.2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1,311,997		429,999		81,627		8,276		5,723		10,215		41,632		65,846			80.67	T		495,845		37.79	Tapem			
				Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan yang dilaksanakan	Dokumen	25	140,250	15		5		3		0		0		2		5		100.00	ST			20		80.00		Tapem			
				Jumlah laporan hasil fasilitasi pendukung kegiatan pemilu	Laporan	5	921,373	3		2		0		1		0		1		2		100.00	ST			5		100.00		Tapem			
				Jumlah peserta sosialisasi kerjasama otonomi daerah	Orang	5	250,374	2		120		0		0		60		60		120		100.00	ST			122		2440.00		Tapem			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					115.67	ST	90.46	ST			291.33	51.74					
			II	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	Persen	85		100		83		0		100		100		100		100		120.48				100.00		120.48					
			III	Persentase peraturan bidang kesra yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	Persen	100		100		99		0		50		50		100		100		101.01				50		50.51					
		4.1.2.2.02	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jenis Dokumen	50	32,380,123	36	17,546,833	9	8,778,276	0	39,313	2	3,271,099	3	1,822,215	4	2,286,021	9	7,418,647	100.00		84.51		45	24,965,480	90.00	77.10				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan					
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13			16=15/6*100				
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100			
		4.1.2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				25,852,755		15,362,095		7,936,276		35,745		2,598,478		1,814,316		2,169,165		6,617,704			83.39	T		21,979,799		85.02	Kesra	
				Jumlah fasilitasi kepada jamaah haji kab. Pati	Laporan	40	17,119,097	16		5		0		3		2		0		5		100.00	ST			21		52.50		Kesra	
				Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi	Laporan	10	1,531,912	10		2		0		0		1		1		2		100.00	ST			12		120.00		Kesra	
				Jumlah laporan hasil monev bantuan tempat ibadah	Laporan	60	363,639	34		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			46		76.67		Kesra	
				Jumlah laporan kegiatan keagamaan	Laporan	45	2,867,603	25		9		2		0		1		6		9		100.00	ST			34		75.56		Kesra	
				Jumlah peringatan hari-hari besar yang diselenggarakan	Laporan	25	3,970,504	15		6		0		0		2		4		6		100.00	ST			21		84.00		Kesra	
		4.1.2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				1,333,623		542,482		252,000		3,568		213,554		2,175		12,527		231,823			91.99	ST		774,305		58.06	Kesra	
				Jumlah laporan update data bidang sosial	Laporan	60	244,885	37		6		2		1		2		1		6		100.00	ST			43		71.67		Kesra	
				Jumlah laporan studi komparatif	Laporan	5	285,901	2		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			3		60.00			
				Jumlah sarana transportasi mudik lebaran yang tersedia	Unit	40	802,837	16		10		0		10		0		0		10		100.00	ST			26		65.00		Kesra	
		4.1.2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				5,193,745		1,642,257		590,000		0		459,067		5,724		104,328		569,119			96.46	ST		2,211,376		42.58	Kesra	
				Jumlah laporan hasil koordinasi PAGN	Laporan	60	2,897,684	26		2		0		0		1		1		2		100.00	ST			28		46.67		Kesra	
				Jumlah laporan hasil koordinasi pencegahan HIV/ AIDS	Laporan	60	1,038,401	26		2		0		1		1		0		2		100.00	ST			28		46.67		Kesra	
				Jumlah laporan koordinasi bidang kesehatan	Laporan	5	1,257,660	5		2		0		1		1		0		2		100.00	ST			7		140.00		Kesra	
				Jumlah kebijakan daerah bidang kesra	Dokumen	3	0	1		2		0		1		0		1		2		100.00	S			3		100.00		Kesra	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100.00	ST	90.61	ST			76.25	61.89		
			IV	Persentase verifikasi draft dokumen hukum	Persen	98		98.82		98		0		99.72		98.79		98.66		98.66		100.67				98.79		100.81			
			V	Persentase penanganan kasus hukum aparatur dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100		100		100		0		100		100		100		100		100				100		100			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian - Kinerja dan Realissasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan					
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100			15=7+13				16=15/6*100				
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)			K	Kategor i	Rp (Ribu)	Kategor i	K
1	2	3	4	5	5.A	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18													
		4.1.2.2.03	1.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jenis dokumen	15	15,232,337	12	2,476,019	3	1,193,292	0	138,927	0	241,768	0	140,638	3	299,037	3	820,369	100.00		68.75		15	3,296,388	100.00	21.64		
		4.1.2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				5,717,830		830,743		249,000		53,520		12,590		40,120		77,939		184,169			73.96	S		1,014,912		17.75	Hukum	
				Jumlah Raperda	Perda	35	3,944,116	35		7		0		3		1		7		11		157.14	T			46		131.43		Hukum	
				Jumlah SK Bupati	SK	5,250	1,773,714	5,208		1,050		191		159		135		190		675		64.29	R			5,883		112.06		Hukum	Sifatnya fasilitasi
		4.1.2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum				4,838,853		653,691		359,292		51,875		15,000		12,825		44,800		124,500			34.65	SR		778,192		16.08	Hukum	Sifatnya fasilitasi
				Jumlah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	Kasus	50	359,978	22		12		4		1		2		3		10		83.33	T			32		64.00		Hukum	Sifatnya fasilitasi
				Jumlah kasus Aparatur	Kasus	65	4,478,875	25		3		2		0		0		0		2		66.67	S			27		41.54		Hukum	Sifatnya fasilitasi
		4.1.2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukm dan Pengelolaan Informasi Hukum				4,675,654		991,584		585,000		33,532		214,178		87,693		176,298		511,700			87.47	T		1,503,284		32.15	Hukum	
				Jumlah buku LD dan BD	Jenis	10	1,240,540	8		2		0		2		0		0		2		100.00	ST			10		100.00		Hukum	
				Jumlah JDH yang dikelola	Bulan	60	995,598	48		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			60		100.00		Hukum	
				Jumlah orang disosialisasi	Orang	4,200	2,439,516	3,360		840		0		0		0		840		840		100.00	ST			4,200		100.00		Hukum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					95.92	T	65.36	R			92.72	21.99			
			VI	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Persen	100		100		100		0		0		100		100		100		100				100		100			
		4.1.2.2.04	1. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan	Jenis	10	1,936,296	8	596,715	2	132,728	0	22,336	1	58,218	0	16,809	1	22,952	2	120,314	100.00		90.65		10	717,029	100.00	37.03		
		4.1.2.2.04.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	90	1,936,296	50	585,653	20	118,042	4	22,336	7	55,820	6	11,140	3	18,338	20	107,634	100.00	ST	91.18	ST	70	693,286	77.78	35.80	Tapem	
		4.1.2.2.04.2	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	1	0	0	0	1	4,958	0	0	1	0	0	0	0	3,404	1	3,404	100.00	ST	68.66	S	1	3,404	100.00	#DIV/0!	Tapem	
		4.1.2.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerjasama	Laporan	4	0	2	11,063	2	9,728	0	0	1	2,398	0	5,669	1	1,210	2	9,276	100.00	ST	95.36	ST	4	20,339	100.00	#DIV/0!	Tapem	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	93.27	ST			88.89	#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan					
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13			16=15/6*100				
									K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)			K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100			
		4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan				26,009,871		5,889,965		818,000		62,092		149,462		181,589		346,000		739,143			90.36		6,629,108		25.49			
			I	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	Persen	85		100		83		0		0		75		100		100		120.48				75		88.24			
			II	Persentase peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi Bupati, SE)	Persen	100		100		100		0		0		100		100		100		100				100		100			
		4.1.3.2.01	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jenis Dokumen	55	6,366,117	41	1,682,197	11	284,000	0	21,429	0	37,351	0	42,072	11	142,743	11	243,595	100.00		85.77		52	1,925,792	94.55	30.25		
		4.1.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi dan pembinaan BUMD dan BLUD	Laporan	220	1,090,985	173	275,465	44	36,887	12	6,822	12	7,984	12	6,209	8	14,984	44	35,999	100.00	ST	97.59	ST	217	311,464	98.64	28.55	Perekonomian	
		4.1.3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3,573,553		781,521		111,475		11,097		20,177		10,040		53,459		94,773			85.02	T		876,293		24.52	Perekonomian	
				Jumlah laporan / analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Laporan	125	584,000	103		35		6		9		9		11		35		100.00	ST			138		110.40		Perekonomian	
				Jumlah laporan/analisis hasil fasilitasi promosi daerah	Jenis dokumen	12	1,380,000	3		0		0		0		0		0		0		0.00	SR			3		25.00		Perekonomian	Tidak ada pelaksanaan di tahun 2022
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi EKUINDA	Laporan	11	92,500	9		2		0		1		0		1		2		100.00	ST			11		100.00		Perekonomian	
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan distribusi dan harga pupuk	Laporan	190	229,092	122		27		6		2		10		9		27		100.00	ST			149		78.42		Perekonomian	
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan pengumpulan informasi dan sosialisasi tentang cukai	Laporan	65	825,911	52		4		0		2		2		0		4		100.00	ST			56		86.15		Perekonomian	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan					
						I	II	III	IV																							
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18	
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)			K
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan peredaran barang dan jasa	Laporan	125	230,000	111		30		6		9		9		6		30		100.00	ST			141		112.80		Perekonomian		
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi TPKAD	Laporan	20	232,050	12		15		4		6		6		4		20		133.33	ST			32		160.00		Perekonomian		
		4.1.3.2.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1,701,579		625,211		135,638		3,510		9,190		25,823		74,301		112,824				83.18	T		738,035		43.37	Perekonomian	
				Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi pembinaan dan pengembangan LKM	Laporan	150	377,000	67		20		4		6		8		2		20		100.00	ST			87		58.00		Perekonomian		
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pemantauan dan pengawasan dana bergulir dan koordinasi kredit program	Laporan	150	281,500	114		40		8		12		12		8		40		100.00	ST			154		102.67		Perekonomian		
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Laporan	45	1,043,079	20		2		0		1		0		1		2		100.00	ST			22		48.89		Perekonomian		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					103.33	ST	88.60	T			89.18	32.15				
			II	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Persen	100		87.75		100		22.44		0		12.24		89.79		89.79		89.79				12.24		12.24				
		4.1.3.2.02	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jenis Dokumen	15	3,591,005	12	1,086,118	3	279,000	0	19,384	1	74,351		48,435	2	120,659	3	262,829	100.00		94.20		15	1,348,947	100.00	37.56			
		4.1.3.2.02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Dokumen	2	0	1	40,758	1	65,000	0	6,174	1	31,939	0	9,420	0	14,499	1	62,031	100.00	ST	95.43	ST	2	102,789	100.00	#DIV/0!	Adpem	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1,426,618		433,735		98,000		9,254		24,993		20,627		35,703		90,576			92.42	ST		524,311		36.75	Adpem		
				Jumlah dokumen laporan movev pembangunan infrastruktur	Laporan	5	996,774	4		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			5		100.00		Adpem		
				Jumlah dokumen rakor POK	Dokumen	20	429,844	16		4		1		1		1		1		4		100.00	ST			20		100.00		Adpem		
		4.1.3.2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2,164,387		611,625		116,000		3,957		17,420		18,389		70,456		110,222			95.02	ST		721,847		33.35	Adpem		
				Jumlah dokumen laporan movev pembangunan	Laporan	170	928,585	135		33		2		14		8		9		33		100.00	ST			168		98.82		Adpem		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisiasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
												I		II		III		IV													
						1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100			
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		
				Jumlah SMEP dan TEPPRA yang dikelola	Laporan	60	1,235,802	48		12		2		1		0		0		3		25.00	SR			51		85.00		Adpem	Aplikasi TEPPRA sementara di nonaktifkan dari pusat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					85.00	T	94.29	ST			96.76	#DIV/0!			
			III	Persentase peraturan bidang pengadaan barang/ jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi Bupati, SE)	Persen	100		100		100		0		100		100		100		100		100			100		100				
			IV	Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	Persen	100		100		99		0		45.50		48.33		100.00		100.00		101.01			48.33		48.33				
		4.1.3.2.03	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jenis Dokumen	10	16,052,749	8	3,048,122	2	125,000	0	20,161	1	30,461	1	10,867	0	51,629	2	113,117	100.00		90.49		10	3,161,239	100.00	19.69		
		4.1.3.2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				13,375,133		2,406,192		83,200		20,161		11,451		7,592		33,585		72,788			87.48	T		2,478,980		18.53	PBJ	
				Jumlah laporan money PBJ	Laporan	5	0	4		1		1		0		0		0		1		100.00	ST			5		100.00		PBJ	
				Jumlah laporan Strategis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	5	0	4		1		0		0		1		0		1		100.00	ST			5		0.00		PBJ	
				Jumlah paket yang dikelola ULP selama setahun	Paket	750	13,375,133	663		180		63		19		5		1		88		48.89	SR			751		100.13		PBJ	Sesuai paket yang masuk dari OPD
		4.1.2.20.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				2,677,616		641,930		41,800		0		19,010		3,275		18,045		40,330			96.48	ST		682,259		25.48	PBJ	
				Jumlah laporan penggunaan dan pengelolaan LPSE	Laporan	60	2,677,616	48		12		3		3		3		3		12		100.00	ST			60	0	100.00		PBJ	
				Jumlah pengembangan aplikasi SIM ULP	Paket	5	0	4		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			5		100.00		PBJ	
				Jumlah sistem informasi yang dikelola	Unit	10	0	8		2		2		0		0		0		2		100.00	ST			10		100.00		PBJ	
				Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSE	Dokumen	85	0	68		17		17		0		0		0		17		100.00	ST			85		100.00		PBJ	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					92.70	ST	91.98	ST			85.73	22.01			
			1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Laporan	0	0	2	73,528	1	130,000	0	1,118	0	7,299	1	80,216	0	30,969	1	119,601	100.00		92.00		3	193,130	100.00	73.53		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan						
									I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13			16=15/6*100					
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	17	18	
			koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	#DIV/0!	Perekonomian	
				Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Dokumen	2	0	1		1		0		0		1		0		1		100.00	ST			2		0.00		Perekonomian		
				Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal	laporan	2	0	1		1		0		0		0		0		0		0.00	SR			1		0.00		Perekonomian	Anggaran digeser ke Satpol PP oleh karena adanya surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100.00	ST	92.00	ST			0.00	#DIV/0!				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										52,866,054		6,167,756		17,073,986		10,122,614		14,284,318		47,648,675												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D 3)																					99.62	ST	89.92	T			101.20	#DIV/0!				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya:																																